

RENSTRA PERUBAHAN 2022-2026



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 dapat terselesaikan. Perubahan Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan urusan Kesehatan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Untuk penyelesaian penyusunan dokumennya, kami ucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak atas terselesaikannya dokumen Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 yang tanpanya, niscaya dokumen ini tak akan selesai sesuai jadwal dan selengkap ini. Semoga atas bantuannya ini dapat menjadikan dokumen-dokumen semacamnya menjadi lebih sempurna dan tepat guna dan diharapkan dokumen Perubahan Renstra Kesehatan Tahun 2021-2026 ini menjadikan arah proses pembangunan di sektor Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih terarah.

Benteng, 01 Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini dilandatangani secara digital

dr. H. Husaini, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196512141998031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan.....	8
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan	15
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan .	53
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN ...	54
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan.....	54
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	58
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.....	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	66
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	68
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	69
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan.....	69
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	77
5.1. Strategi.....	77
5.2. Arah Kebijakan.....	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	84
6.1. Rencana Program	84
6.2. Kegiatan	84
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	124
BAB VIII PENUTUP.....	130

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		
2.1	Bagan Struktur Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	13
2.2	Struktur Organisasi RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar	14

DAFTAR TABEL

No. Tabel		
2.1	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Tahun 2023	15
2.2	Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Tahun 2023	15
2.3	Tenaga Kesehatan Puskesmas Tahun 2023	16
2.4	Jumlah Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Tahun 2023	18
2.5	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023	18
2.6	Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023	19
2.7	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar	23
2.8	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Kepulauan Selayar	25
2.9	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Kepulauan Selayar	26
2.10	Angka Kematian Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar	27
2.11	Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar	28
2.12	Angka Kematian Balita Per 1.000 KH Kabupaten Kepulauan Selayar	28
2.13	Angka Kematian Neonatal Per 1.000 KH Kabupaten Kepulauan Selayar	29
2.14	Angka Kematian Ibu Kabupaten Kepulauan Selayar	30
2.15	Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Kepulauan Selayar	31
2.16	Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar	32
2.17	Jumlah Puskesmas, Pustu, Poliklinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar	32
2.18	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar	33
2.19	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar	34
2.20	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar	34
2.21	Cakupan Komplikasi Kebidanan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kabupaten	36

	Kepulauan Selayar	
2.22	Cakupan Pertolongan Persalinan Kabupaten Kepulauan Selayar	37
2.23	Cakupan Desa/Kelurahan UCI Kabupaten Kepulauan Selayar	38
2.24	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum Kabupaten Kepulauan Selayar	39
2.25	Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Kepulauan Selayar	40
2.26	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar	41
2.27	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC dan BTA Kabupaten Kepulauan Selayar	42
2.28	Prevalensi TBC Kabupaten Kepulauan Selayar	43
2.29	Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Kepulauan Selayar	43
2.30	Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Kepulauan Selayar	44
2.31	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Kepulauan Selayar	45
2.32	Prevalensi HIV/AIDS Kabupaten Kepulauan Selayar	46
2.33	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kabupaten Kepulauan Selayar	47
2.34	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Kepulauan Selayar	48
2.35	Desa/Kelurahan Mengalami KLB Kabupaten Kepulauan Selayar	49
2.36	Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	50
2.37	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2016-2020	51
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	56
4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Penjelasan Indikator Jangka Menengah Dinas Kesehatan	71
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	73

4.3	Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	75
5.1	Analisis SWOT	78
5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	79
5.3	Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar	80
6.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	87
6.2	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	99
6.3	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	101
6.4	Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	111
7.1	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	125
7.2	Penetapan Target Indikator SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	127
7.3	Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026	130

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saat ini pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada isu-isu yang masih belum terselesaikan seperti masih tingginya kematian ibu dan kematian bayi, permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (*stunting*), beban ganda penyakit dimana penyakit menular masih muncul sedangkan tidak menular semakin meningkat, belum optimalnya upaya promotif dan preventif, serta rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan perlunya disusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kementerian Kesehatan telah menetapkan RPJMN dan Renstra tahun 2020 – 2024 yang merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan bidang Kesehatan di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi capaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan Negara-negara yang berpenghasilan menengah keatas yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat empat pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan periode akhir. Ke empat pilar tersebut diterjemahkan dalam tujuh agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. Tujuan RPJMN IV tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target – target tersebut dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya ditampung dalam tujuh agenda pembangunan.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur khususnya bidang kesehatan ditandai dengan:

1. Terjaminnya keamanan kesehatan Negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, respon terhadap ancaman global.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga Negara terhadap lembaga jaminan sosial yang menyeluruh.

3. Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Rencana strategis (Renstra) berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun, menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan, sebagai dasar penilaian kerja pimpinan organisasi perangkat daerah, serta menjadi acuan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2. Landasan Hukum

Penyelenggaraan pembanguana kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005– 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005- 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2028;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD, serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
17. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026;

27. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk :

1. Sebagai pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menyusun rencana kerja lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.3.2. Tujuan

1. Merupakan dokumen yang dapat di gunakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan.
2. Sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi, monitoring evaluasi kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar baik itu kegiatan internal maupun eksternal.
4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar Bidang dalam lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

2.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Kebijakan yang mengatur tentang Perangkat Daerah, Kedudukan serta Tugas Pokok dan Fungsinya adalah Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan Dipimpin Oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Secara umum Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun uraian tugas pokok Kepala Dinas, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Kesehatan.
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
- f. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat;
- g. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- h. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
- i. Menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan;
- j. Menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang kesehatan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- m. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas di dukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari:

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan Program dan Pelaporan, Umum, Hukum dan Kepegawaian, serta Keuangan dalam lingkup Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya

fungsi sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas.
- b. Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan.
- c. Pengordinasian urusan umum, hukum, dan kepegawaian.
- d. Pengordinasian pengelolaan keuangan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai fungsi membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang kesehatan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan masyarakat.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kesehatan masyarakat.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pencegahan dan pengendalian penyakit. Kepala bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

- a. Perumusan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- b. Pelaksanaan teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang

pengecegan dan pengendalian penyakit.

- d. Pelaksanaan administrasi bidang pengecegan dan pengendalian penyakit.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan primer dan tradisional, pelayanan rujukan, serta fasilitas kesehatan dan peningkatan mutu.

Fungsi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan adalah:

- a. Perumusan teknis bidang pelayanan kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan.
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas membantu Kepala Dinas dalam mengordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis sumber daya kesehatan. Kepala Bidang Sumber Daya mempunyai fungsi:

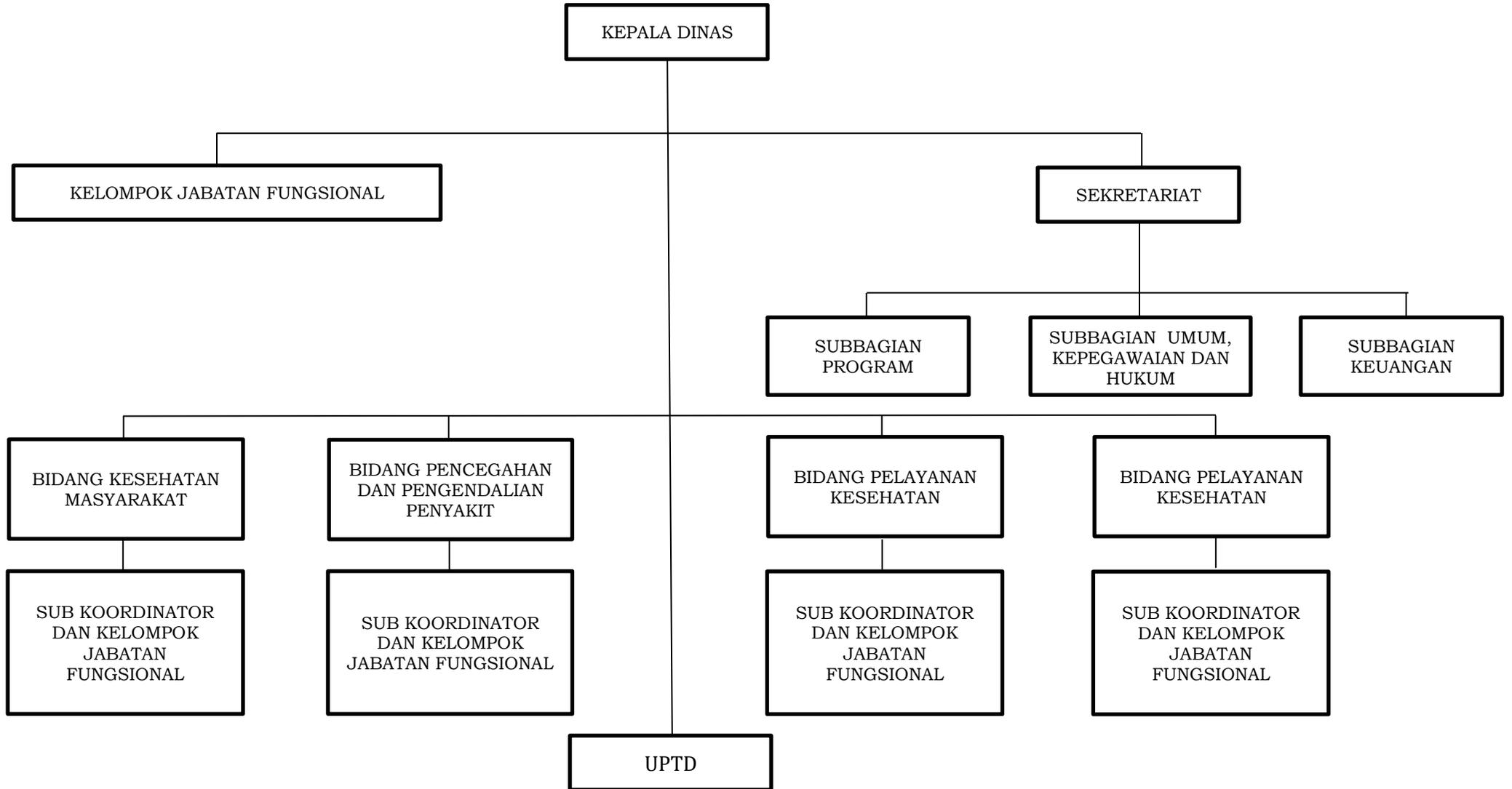
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sumber daya kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya kesehatan.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang dan tugasnya.

2.1.2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

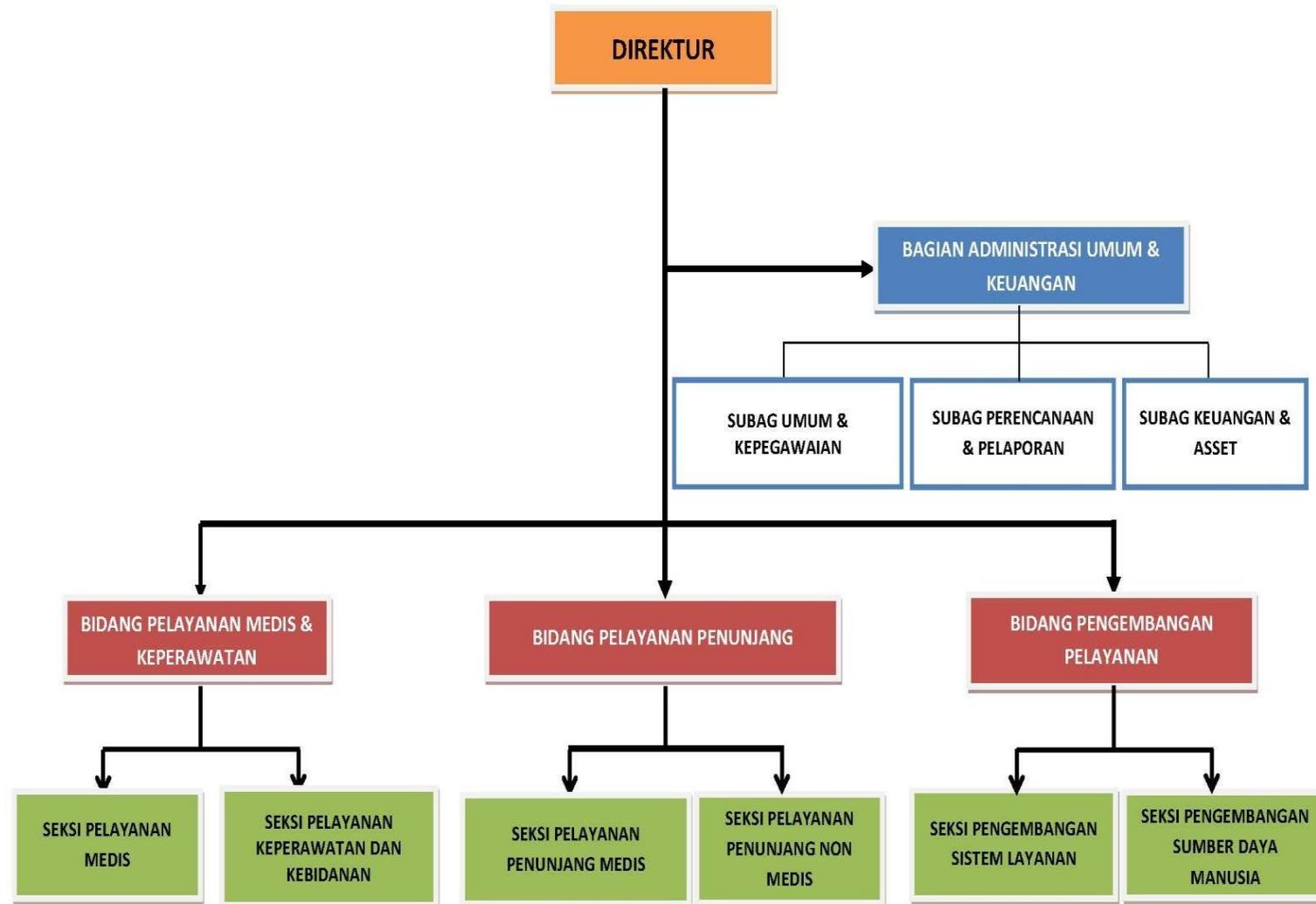
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum, Hukum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kesehatan masyarakat, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis

Gambar 2.1
 Bagan Struktur Dinas Kesehatan
 Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 2.2
Struktur Organisasi RSUD K.H. Hayyung
Kabupaten Kepulauan Selayar

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. HAYYUNG



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kepegawaian

Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	14
3.	Eselon IV	47
4.	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	735
5.	Fungsional Pelaksana (Staf)	38
Jumlah		550

2. Jumlah Pegawai Menurut Jurusan / Keahlian

Daftar Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 2.2
Jumlah Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan
Tahun 2023

No	Tenaga Kesehatan	Jumlah	%
1.	Dokter Spesialis	9	0,6
2.	Dokter Umum	39	2,5
3.	Dokter Gigi	9	0,6
4.	Perawat	506	32,4
5.	Bidan	641	41,4
6.	Kesehatan Masyarakat	59	3,8
7.	Kesehatan Lingkungan	31	2
8.	Kefarmasian	37	2,4
9.	Apoteker	29	1,9
10.	Laboratorium	51	3,3
11.	Teknisi Medis	29	1,9
12.	Tenaga Penunjang	120	7,7
Jumlah		1.560	

Pada tahun 2020, total SDM Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 1.560 orang baik ASN, PPT dan Tenaga kontrak lainnya, terdiri dari 9 Dokter spesialis (0,6%), 39 Dokter Umum (2,5%), 9 Dokter Gigi (0,6%), 506 Perawat (32,4%), 641 Bidan (41,4%), 59 Tenaga Kesehatan Masyarakat (3,8%), 31 Tenaga Kesehatan Lingkungan (2,0%), 37 Tenaga Kefarmasian (2,4%), 29 Tenaga Apoteker (1,9%), 51 Tenaga Laboratorium (3,3%), 29 Teknisi Medis (1,9%), dan 120 Tenaga Penunjang (7,7%).

3. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Tabel 2.3
Tenaga Kesehatan Puskesmas
Tahun 2023

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah	%
1.	Dokter	25	2
2.	Dokter Gigi	14	1,1
3.	Bidan	542	43,6
4.	Perawat	337	27,1
5.	Kesehatan Masyarakat	51	4,1
6.	Kesehatan Lingkungan	32	2,6
7.	Laboratorium	21	1,7
8.	Kefarmasian	38	3,1
9.	Gizi	36	2,9
10.	Teknisi Penunjang	149	11,8
Total		1.243	

Total tenaga kesehatan di Puskesmas sebanyak 1.243 orang yang terdiri dari 25 orang tenaga dokter (2,0 %), 14 dokter gigi (1,1 %), 542 orang tenaga bidan (43,6 %), tenaga keperawatan 337 orang (27,1 %), 51 orang tenaga kesehatan masyarakat (4,1 %), 32 orang tenaga kesling (2,6 %), 21 orang tenaga Lab (1,7 %), 38 tenaga kefarmasian (3,1 %), 36 orang Gizi (2,9 %), dan tenaga penunjang 149 orang (11,8 %).

4. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Puskesmas Benteng pada Tahun 2023 memiliki 4 tenaga Dokter dan sudah memenuhi standar. Puskesmas Bontosunggu, Bontomatene, Barugaia, Benteng, Jampea, Buki, Pasi Marannu, Pasi Lambena, dan Puskesmas Ujung Jampea masing-masing 2 tenaga dokter pada tahun 2023. Selbihnya itu masih ada 5 Puskesmas yang belum mempunyai 1 Tenaga Dokter yaitu Puskesmas Parangia, Polebunging, Bontosikuyu, Lowa, dan Pasitallu. Jadi masih ada 13 Puskesmas yang belum memenuhi standar.

5. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Jumlah Dokter Gigi di Puskesmas minimal 1 Orang, baik di Puskesmas rawat inap dan non inap dan di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 terdapat 2 Puskesmas yang memiliki masing-masing 2 Dokter Gigi yaitu Puskesmas Benteng dan Puskesmas Parangia, sedangkan 8 Puskesmas masing-masing 1 Dokter

Gigi yaitu Puskesmas Bontosunggu, Bontomatene, Barugaia, Polebunging, Bontosikuyu, Lowa, Buki, dan Puskesmas Pasitallu. Sedangkan Puskesmas yang belum memiliki dokter Gigi pada tahun 2023 sebanyak 4 Puskesmas yaitu Puskesmas Benteng Jampea, Pasilambena, Pasimarannu, dan Puskesmas Ujung Jampea.

6. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Perawat pada Puskesmas non rawat inap minimal berjumlah 5 orang sedangkan pada Puskesmas rawat inap minimal berjumlah 8 orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2023, semua Puskesmas memiliki jumlah tenaga perawat lebih dari standar yang ditetapkan, proporsi terbesar Puskesmas dengan jumlah perawat berlebih terdapat pada Puskesmas Bontosunggu 41 orang dan Puskesmas Barugaia sebanyak 39 orang tenaga perawat. Proporsi terkecil yakni pada Puskesmas Lowa 4 orang tenaga perawat.

7. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Jumlah Bidan di Puskesmas non rawat inap 4 orang dan di Puskesmas rawat inap minimal 7 orang. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Ketersediaan Bidan pada Puskesmas Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023, semua Puskesmas telah memenuhi syarat ketersediaan tenaga Bidan dengan proporsi terbesar yakni pada Puskesmas Bontosunggu dan Pasitallu masing-masing 53 Tenaga. Puskesmas Barugaia sebanyak 52 tenaga Bidan. Adapun proporsi terkecil yakni pada Puskesmas Bontosikuyu sebanyak 12 tenaga Bidan.

8. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Kesehatan Rumah Sakit
Tahun 2023

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah	%
1.	Dokter Spesialis	8	5,2
2.	Dokter	11	7,1
3.	Dokter Gigi	1	0,6
4.	Perawat	72	46,8
5.	Bidan	25	16,2
6.	Kesehatan Masyarakat	12	7,8
7.	Kesehatan Lingkungan	1	0,6
8.	Kefarmasian	7	4,5
9.	Tenaga Penunjang	17	11
Total		154	

Total SDM di Rumah sakit pada Tahun 2023 sebanyak 154 orang terdiri dari 8 Dokter Spesialis (5,2%), 11 orang tenaga Dokter (7,1%), 1 orang tenaga Dokter Gigi (0,6%), 72 orang tenaga Perawat (46,8%), 25 orang tenaga Bidan (16,2%), 7 Tenaga Kefarmasian (4,5%), 12 orang tenaga Kesehatan Masyarakat (7,8%), 1 orang Tenaga Kesehatan Lingkungan (0,6%), dan tenaga penunjang 17 orang (11 %).

9. Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Tabel 2.5
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Tahun 2023

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Umum	1
2.	Bidan	78
3.	Perawat	123
4.	Kesehatan Masyarakat	2
5.	Kesehatan Lingkungan	2
6.	Kefarmasian	11
7.	Tenaga Penunjang	22
Total		239

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan sangat terpencil, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2023 telah mengangkat 239 orang status PTT yang ditugaskan di Kab. Kepulauan Selayar. Dokter umum sebanyak 1 orang, Bidan sebanyak 78 orang, Perawat sebanyak 123 orang, Kesehatan Masyarakat 2 orang, Kesehatan Lingkungan 2 orang, kefarmasian 11 orang, dan Tenaga penunjang medis 22 orang.

Aset Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar diantaranya, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Aset Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023

No.	Jenis Aset	Status			Jumlah
		Baik	Sedang	Rusak Berat	
1.	Tanah Bangunan rumah Negara tanpa golongan	Baik			8
2.	Tanah Bangunan gudang	Baik			10
3.	Tanah bangunan kantor pemerintah	Baik			2
4.	Tanah bangunan pendidikan dan pelatihan	Baik			1
5.	Tanah bangunan puskesmas / Posyandu	Baik			61
6.	Forklift	Baik			1
7.	Portable water pump	Baik			2
8.	station wagon	Baik			2
9.	Bus	Baik			1
10.	Mini Bus	Baik			6
11.	Pick Up	Baik			1
12.	Sepeda Motor	Baik			202
13.	Mobil Ambulance	Baik			31
14.	Gerobak Dorong	Baik			1
15.	Kapal Motor	Baik			10
16.	Mesin Kompresor	Baik			3
17.	Mesin Dinamo Kron	Baik			2
18.	Bak Air	Baik			3
19.	Ukuran Tinggi Orang	Baik			17
20.	Mesin Ketik Manual Standar	Baik			11
21.	Mesin Hitung Elektronik	Baik			2
22.	Lemari Besi	Baik			169
23.	Lemari Kayu	Baik			73
24.	Rak Besi	Baik			9
25.	Rak Kayu	Baik			50
26.	Fling Kabinet Besi	Baik			3
27.	Brandkas	Baik			16
28.	Lemari Kaca	Baik			10

29.	Lemari Makan	Baik			1
30.	CCTV	Baik			1
31.	Papan Nama	Baik			17
32.	White Board	Baik			1
33.	Mesin Absensi	Baik			1
34.	Overhead Projektor	Baik			8
35.	Display	Baik			1
36.	Alarm Indikator	Baik			1
37.	Papan Nama Instansi	Baik			25
38.	Papan Pengumuman	Baik			8
39.	Alat Kantor Lainnya	Baik			19
40.	Meja Kerja Besi	Baik			23
41.	Meja Kerja Kayu	Baik			64
42.	Kursi Kayu	Baik			324
43.	Meja Rapat	Baik			31
44.	Tempat Tidur Besi	Baik			6
45.	Tempat Tidur Kayu	Baik			12
46.	Meja Ketik	Baik			22
47.	Meja Resepsionis	Baik			2
48.	Meja Tambahan	Baik			7
49.	Meja Panjang	Baik			4
50.	Meja Obat	Baik			1
51.	Meja ½ Biro	Baik			175
52.	Spring Bed	Baik			2
53.	Kursi Rapat	Baik			72
54.	Kursi Tamu	Baik			70
55.	Kursi Putar	Baik			31
56.	Kursi Biasa	Baik			22
57.	Bangku Tunggu	Baik			7
58.	Kursi Lipat	Baik			1
59.	Meja Komputer	Baik			11
60.	Sofa	Baik			14
61.	Meubeleur Lainnya	Baik			32
62.	Jam Mekanis	Baik			2
63.	Jam Elektronik	Baik			6
64.	Mesin Pemotong Rumput	Baik			1

65.	Mesin Cuci	Baik			1
66.	Lemari ES	Baik			15
67.	A.C Window	Baik			102
68.	Kipas Angin	Baik			105
69.	Cold Storage	Baik			10
70.	Alat Pendingin Lainnya	Baik			4
71.	Kompore Gas	Baik			2
72.	Kompore Minyak	Baik			1
73.	Rice Cooker	Baik			6
74.	Radio	Baik			4
75.	TV	Baik			50
76.	Amplifer	Baik			9
77.	Loudspeker	Baik			7
78.	Sound System	Baik			14
79.	Wireless	Baik			3
80.	MegaPhone	Baik			7
81.	Microphone	Baik			10
82.	Unit Power Supply	Baik			5
83.	Tustel	Baik			4
84.	Timbangan Orang	Baik			30
85.	Tangga Aluminium	Baik			2
86.	Dispenser	Baik			6
87.	Alat Pemanas Ruangan	Baik			1
88.	Alat Rumah Tangga Lainnya	Baik			220
89.	Alat Pemadam	Baik			10
90.	Alat Pembantu Kebakaran	Baik			16
91.	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati	Baik			13
92.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Baik			58
93.	Kursi Meja Pejabat Lainnya	Baik			38
94.	Camera Elektronik	Baik			7
95.	Layar Film	Baik			19
96.	Telephone	Baik			2
97.	Pesawat Telephone	Baik			4
98.	Telephone Mobile	Baik			7
99.	Hand Talky	Baik			6

100.	Antene SHF Transportable	Baik			6
101.	Genset	Baik			19
102.	Sterilisato	Baik			16
103.	Diagnostik Set	Baik			18
104.	Stetoskop Set	Baik			300
105.	Tensimeter	Baik			300
106.	Head Lamp	Baik			24
107.	Waskom	Baik			68
108.	Timbangan Badan	Baik			60
109.	Timbangan Bayi	Baik			60
110.	Kocher	Baik			28
111.	Tempat Tidur	Baik			350
112.	Metal Chatheete	Baik			6
113.	Anaromische Pinse	Baik			80
Total					67.801

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Tujuan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar yang tercantum dalam RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021-2024 yang berkaitan dengan kesehatan adalah “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat”. Indikator kinerja tujuan pembangunan tersebut berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 yang mendukung terhadap tujuan tersebut adalah Angka Harapan Hidup, Rasio kematian bayi, Rasio kematian ibu, Persentase Balita Gizi Buruk, Cakupan pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin pada pelayanan kesehatan dasar, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) per satuan penduduk, Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk, Rasio dokter per satuan penduduk, rasio paramedis per satuan penduduk, Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan dan Rasio Posyandu.

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan sebagai salah satu dasar penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Hidup (AHH) memberikan gambaran probabilitas umur maksimal yang dapat dicapai seorang bayi baru lahir. Indikator ini dipandang dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa, sehingga dijadikan salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Peningkatan Angka Harapan Hidup menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan penduduk serta meningkatnya derajat kesehatan.

Untuk dapat meningkatkan Umur Harapan Hidup bukan saja diperlukan program pembangunan kesehatan namun diperlukan juga program sosial lainnya seperti program pemberantasan kemiskinan, perbalikan kualitas lingkungan hidup, kecukupan pangan dan gizi, serta pendidikan. Indikator Angka Harapan Hidup tidak bisa didapatkan dari sistem pencatatan pelaporan rutin, tetapi melalui estimasi berdasarkan data primer hasil survey atau sensus yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 2.7
Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun	Angka Usia Harapan Hidup	Peningkatan /Penurunan	Naik/Turun
2016	67,76 tahun	-	-
2017	67,82 tahun	0,06 tahun	Naik
2018	68,03 tahun	0,21 tahun	Naik
2019	68,34 tahun	0,31 tahun	Naik
2020	68,46 tahun	0,12 tahun	Naik

Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat banyak hal yang mempengaruhi angka harapan hidup berdasarkan jumlah bayi lahir dan meninggal dalam periode tertentu. Berikut beberapa faktor di antaranya adalah:

- a. Harapan subjektif: keinginan yang dimiliki seseorang terhadap panjang usianya sendiri.
- b. Demografi: terdiri dari jenis kelamin, usia, dan kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan yang dimaksud adalah catatan seseorang apakah ia pernah terkena salah satu dari penyakit berat, seperti hipertensi, osteoarthritis, TBC, asma, diabetes, kanker, depresi, sirosis hati, maupun gagal ginjal.
- c. Sosio-ekonomi: termasuk kondisi tempat tinggal, pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal (mengontrak atau rumah sendiri), dan asuransi.
- d. Gaya hidup: misalnya merokok, konsumsi alkohol, atau rutin berolahraga atau tidak.
- e. Psikososial: menggambarkan kondisi mental seseorang, apakah ia merasa depresi, seberapa sering ia memiliki *quality time*, dan lain-lain.

Beberapa kebijakan telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam meningkatkan angka harapan hidup antara lain berupa sosialisasi penerapan gaya hidup sehat seperti tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol, dan erolahraga rutin.

2. Persentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan di Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Kepulauan Selayar diperoleh data Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi. Walaupun belum mencapai target yang diharapkan, namun hal ini menunjukkan bahwa usaha pemerintah dalam mengatasi permasalahan di sektor gizi telah memberikan hasil yang cukup berarti. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Tabel 2.8
Persentase Balita Gizi Buruk
Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Balita Gizi Buruk	%	0.07	0.08	0.05	0.12	0.09

Saat ini dalam upaya penurunan penderita gizi buruk pada balita, program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar lebih diarahkan pada upaya penanggulangannya seperti pemberian makanan tambahan atau PMT. Walaupun sesungguhnya, kejadian gizi buruk di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan konsumsi makanannya tetapi juga faktor lainnya seperti keadaan ekonomi, pendidikan, pola asuh, sanitasi lingkungan, morbiditas (penyakit infeksi), dan akses ke pelayanan kesehatan.

Upaya untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui pelaksanaan surveilans gizi berupa Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 87 desa/kelurahan. PSG sebagai upaya monitoring dan evaluasi keberhasilan program perbaikan gizi guna memberikan petunjuk apakah program yang dijalankan sudah berdampak pada penurunan masalah gizi seperti yang diharapkan yaitu menurunkan prevalensi stunting, *underweight* dan *wasting*.

Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengatasi dan atau menekan jumlah balita gizi buruk, antara lain :

- a. Pemberian makanan tambahan bagi balita pada saat penimbangan di Posyandu;
- b. Pemeriksaan kesehatan balita secara rutin;
- c. Peningkatan ketahanan pangan keluarga;
- d. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; dan
- e. Pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan.

3. Prevalensi Balita Gizi Kurang

Saat ini dalam upaya penurunan penderita gizi kurang pada balita, program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar lebih diarahkan pada upaya penanggulangannya seperti pemberian

makanan tambahan atau PMT. Walaupun sesungguhnya, kejadian gizi kurang di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan konsumsi makanannya tetapi juga faktor lainnya seperti keadaan ekonomi, pendidikan, pola asuh, sanitasi lingkungan, morbiditas (penyakit infeksi), dan akses ke pelayanan kesehatan. Untuk prevalensi balita gizi kurang di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Prevalensi Balita Gizi Buruk
Kabupaten Kepulauan Selayar

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	75	70	60	54	45

Kasus penderita gizi kurang/kekurangan gizi (*underweight*) di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam lima tahun terakhir, terjadi pada anak usia di bawah lima tahun (Balita) serta prevalensi pendek dan sangat pendek (*stunting*) pada anak usia di bawah dua tahun (Baduta).

Upaya untuk mengawal perbaikan gizi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan melalui pelaksanaan surveilans gizi berupa Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 87 desa/kelurahan. PSG sebagai upaya monitoring dan evaluasi keberhasilan program perbaikan gizi guna memberikan petunjuk apakah program yang dijalankan sudah berdampak pada penurunan masalah gizi seperti yang diharapkan yaitu menurunkan prevalensi *stunting*, *underweight* dan *wasting*.

Secara umum, langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam mengatasi dan atau menekan jumlah balita gizi buruk, antara lain :

- a. Pemberian makanan tambahan bagi balita pada saat penimbangan di Posyandu;
- b. Pemeriksaan kesehatan balita secara rutin;
- c. Peningkatan ketahanan pangan keluarga;
- d. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan; dan
- e. Pola asuh orang tua termasuk praktik dalam pemberian makan.

4. Angka Kematian Bayi

Satu tahun, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2.10
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	3	0	0	1	0
2.	Pasilambena	0	0	0	0	0
3.	Pasimasunggu	1	1	0	0	0
4.	Taka bonerate	5	4	3	0	1
5.	Pasimasunggu Timur	1	0	0	0	1
6.	Bontosikuyu	2	4	0	2	3
7.	Bontoharu	2	1	2	1	3
8.	Benteng	2	0	0	3	0
9.	Bontomanai	0	1	2	0	0
10.	Bontomatene	0	0	0	0	0
11.	Buki	3	0	1	4	0
Jumlah		19	11	8	11	8
Angka Kematian Bayi		10,2	5,75	3,95	5,62	3,70

Masih adanya angka kematian bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih disebabkan oleh faktor budaya, dimana dalam kasus kematian bayi, kebanyakan disebabkan oleh rendahnya kesadaran pihak keluarga untuk melaksanakan persalinan di pusat pelayanan kesehatan (Pustu/Puskesmas/RSU). Beberapa kasus ditemukan dimana perempuan yang melahirkan sudah dalam keadaan darurat sehingga tidak tertolong nyawanya. Ini lantaran keluarga terdekat melarang dirujuk ke fasilitas medis yang memadai.

5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indikator ini menunjukkan besarnya peluang bayi untuk hidup sampai dengan usia 1 (satu) tahun. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa jumlah bayi yang memiliki peluang hidup sampai dengan satu tahun selama periode 2016-2020 di Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi. Hal ini disebabkan karena jumlah bayi yang lahir setiap tahunnya juga berfluktuasi.

Tabel 2.11

Angka Kelangsungan Hidup Bayi Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	200	170	155	180	190
2.	Pasilambena	190	200	148	175	224
3.	Pasimasunggu	125	175	160	168	100
4.	Taka bonerate	115	130	152	266	169
5.	Pasimasunggu Timur	160	150	136	175	278
6.	Bontosikuyu	139	201	180	140	90
7.	Bontoharu	352	363	230	200	234
8.	Benteng	230	150	153	145	85
9.	Bantomanai	98	111	168	150	240
10.	Bontomatene	105	130	150	170	170
11.	Buki	225	130	253	185	200
Angka Kelangsungan Hidup Bayi		1.912	1.910	1.885	1.954	1.980

6. Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita sendiri memiliki arti bahwa suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Tabel 2.12

Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	0	0	0	0	0
2.	Pasilambena	0	0	0	0	0
3.	Pasimasunggu	0	3	0	0	0
4.	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5.	Pasimasunggu Timur	0	0	1	0	0
6.	Bontosikuyu	0	0	0	0	1
7.	Bontoharu	0	0	2	0	0
8.	Benteng	0	0	0	0	0

9.	Bontomanai	0	0	0	1	0
10.	Bontomatene	0	0	0	0	0
11.	Buki	2	0	1	1	1
Jumlah		2	3	4	2	2
Angka kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup		1,07	1,57	1,97	1,02	0,92

Masih adanya kematian yang terjadi pada balita di kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan beberapa faktor, diantaranya: kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan dan lain-lain.

7. Angka Kematian Neonatal

Angka Kematian Neonatal adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1.000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu.

Tabel 2.13

Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup Menurut Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	1	0	0	2	0
2.	Pasilambena	0	1	0	1	0
3.	Pasimasunggu	0	0	2	0	2
4.	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5.	Pasimasunggu Timur	1	0	1	0	0
6.	Bontosikuyu	0	2	0	3	1
7.	Bontoharu	3	0	0	0	0
8.	Benteng	0	0	3	0	2
9.	Bontomanai	1	0	0	1	0
10.	Bontomatene	0	0	0	1	0
11.	Buki	0	1	1	0	1
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup		9,937	5,759	4,244	5,629	4,545

Angka kematian bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar berfluktuasi. Dalam konteks Kabupaten Kepulauan Selayar, Angka Kematian Neonatal selama periode 2016-2020, diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu : a) masih adanya Ibu yang Melahirkan tidak ditangani oleh petugas kesehatan karena factor geografis, maupun kesadaran keluarga; b) Bayi yang lahir, kekurangan gizi; c) kesalahan perawatan dari keluarga; d) terdapat satu kasus kematian neonatal akibat kecelakaan.

Dalam upaya menurunkan angka kematian neonatal, pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah upaya preventif, antara lain melaksanakan sweeping ibu hamil, peningkatan pelayanan melalui kunjungan petugas kebidanan ke keluarga balita, serta peningkatan keterampilan keluarga dalam merawat dan mengasuh anak.

8. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas disetiap 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu merupakan indikator yang sangat penting. Beberapa faktor yang menjadi penyebab angka kematian ibu ialah Peningkatan kualitas pelayanan pemantauan resiko tinggi belum maksimal, kondisi geografis sebagai Kabupaten kepulauan yang tidak mendukung saat terjadi kasus emergensi yang segera harus dirujuk pada saat persalinan, asupan nutrisi masa kehamilan yang tidak tercukupi sehingga terjadi komplikasi pada Ibu Hamil misalnya Anemia dan Hipertensi.

Tabel 2.14
Angka Kematian Ibu
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	1	1	0	0	1
2.	Pasilambena	0	0	0	1	1
3.	Pasimasunggu	0	0	1	0	0
4.	Taka bonerate	1	1	1	1	2
5.	Pasimasunggu Timur	1	0	0	0	0
6.	Bontosikuyu	0	0	0	0	1
7.	Bontoharu	0	1	0	2	2
8.	Benteng	1	0	0	1	0
9.	Bontomanai	2	0	0	0	0
10.	Bontomatene	0	0	0	0	0
11.	Buki	0	0	0	0	0
Jumlah		6	3	2	5	7
Angka Kematian Ibu (AKI)		322,2	157,06	98,81	255,8	324,2

Beberapa faktor penyebab kematian ibu di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Peningkatan kualitas pelayanan pemantauan resiko tinggi belum maksimal, kondisi geografis

sebagai Kabupaten kepulauan yang tidak mendukung saat terjadi kasus emergensi yang segera harus dirujuk pada saat persalinan, asupan nutrisi masa kehamilan yang tidak tercukupi sehingga terjadi komplikasi pada Ibu Hamil misalnya Anemia dan Hipertensi.

9. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Indikator ini menunjukkan ketersediaan posyandu untuk melayani balita dalam satu wilayah pemukiman. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Rasio Posyandu per satuan balita rata-rata sebesar 1:15

Tabel 2.15
Rasio Posyandu Per Satuan Balita
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu (buah)	300	302	305	305	307
2.	Jumlah Balita	1.912	1.910	1.885	1.954	1.980
3.	Rasio Posyandu persatuan balita	1:15	1:15	1:16	1:15	1:15

Dari standar rasio ketersediaan posyandu sebesar 1 : 50, sesuai tabel 2-15, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan posyandu di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melayani balita sudah memadai dengan rasio sebesar 1 :15. Angka rasio tersebut sudah melampaui standar yang ditetapkan.

10. Rasio Puskesmas, Pustu, poliklinik, Persatuan Penduduk

Rasio ini menunjukkan ketersediaan puskesmas, poliklinik, maupun pustu yang mampu melayani penduduk dalam satu satuan pemukiman. Dari sisi ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah memadai, rata-rata setiap desa sudah memiliki sarana pelayanan kesehatan berupa pustu ataupun polindes. Selain itu, Dari sisi ketersediaan puskesmas, terdapat 3 kecamatan yang memiliki 2 puskesmas yaitu Kecamatan Bontomatene, Bontomanai, dan Bontosikuyu. Sekalipun demikian,

kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari banyak pulau, menyebabkan akses penduduk terhadap layanan kesehatan berbeda-beda, karena belum semua pulau terdapat fasilitas kesehatan.

Tabel 2.16
Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik Persatuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	8	8	8	8	8
2.	Pasilambena	5	5	5	5	5
3.	Pasimasunggu	7	7	7	7	7
4.	Taka Bonerate	9	9	9	9	10
5.	Pasimasunggu Timur	6	6	6	6	7
6.	Bontosikuyu	13	13	13	13	13
7.	Bontoharu	9	9	9	9	10
8.	Benteng	2	3	3	3	4
9.	Bontomanai	12	12	12	13	13
10.	Bontomatene	10	10	10	10	10
11.	Buki	6	6	6	6	6
Jumlah		87	88	88	89	93
Rasio Puskesmas		0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006

Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa puskesmas, poliklinik, dan pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021 meningkat setiap tahun. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada periode yang sama, maka diperoleh rasio puskesmas, poliklinik, pustu sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu (buah)	87	88	88	89	93
2.	Jumlah Penduduk	131.605	133.003	134.280	135.642	137.071
3.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan Penduduk	7:10.000	7:10.000	7:10.000	7:10.000	7:10.000
		1:1513	1:1511	1:1526	1:1524	1:1474

Selama periode 2016-2021, rasio puskesmas, poliklinik, pustu di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah rata-rata dalam 7 unit fasilitas kesehatan melayani 10 ribu penduduk, atau 1 unit fasilitas kesehatan melayani sebanyak 1.500 penduduk. Rasio tersebut sudah memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu rasio puskesmas, poliklinik dan pustu persatuan penduduk adalah 1 fasilitas kesehatan maksimal melayani 10.000 penduduk.

11. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Ketersediaan Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai dengan Tahun 2020, baru 1 buah, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Hayyung untuk melayani . Pembangunan rumah sakit pratama di Pulau Jampea pada tahun 2018, hingga kini belum dapat dioperasikan karena kelengkapan alat, obat, dan tenaga kesehatan yang belum memadai. Adapun Rasio Rumah Sakit selama periode 2016-2021, di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rumah Sakit (buah)	1	1	1	1	2
2.	Jumlah Penduduk	131.605	133.003	134.280	135.642	137.071
3.	Rasio Rumah Sakit per 100 rb Penduduk	1:1,32	1:1,33	1:1,34	1:1,35	2:1,37

Pelayanan di RSUD KH. Haiyung yang merupakan satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki tingkat kepadatan yang tinggi. Oleh karena itu, selama rentang waktu 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, antara lain berupa:

- a. Penambahan gedung perawatan;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rumah sakit;
- c. Penambahan jumlah dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya
- d. Peningkatan jumlah dan kualitas obat dan perbekalan kesehatan.

12. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Ketersediaan dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis di Kabupaten Kepulauan Selayar masih jauh dari memadai, apalagi dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani. Adapun Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,238	0,135	0,112	0,108	0,109

Selama periode 2016-2021, terjadi penurunan rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain karena pertambahan jumlah penduduk, beberapa faktor terjadinya penurunan rasio dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain, yaitu :

- a. Habis masa tugas. Sejumlah dokter yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan dokter dengan status Dokter Pegawai Tidak Tetap yang ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan. Tenaga dokter yang bersangkutan, segera meninggalkan daerah setelah masa tugas mereka sesuai kontrak telah berakhir;
- b. Pindah Ikut Suami/Isteri. Terdapat juga kasus, dimana dokter yang dulunya terangkat pertama kalinya sebagai Dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar, namun setelah diangkat dan bertugas, kemudian bermohon pindah dengan alasan ikut

suami atau ingin dekat dengan keluarga.

Sesungguhnya, sejak tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah berupaya untuk meningkatkan ketersediaan dokter antara lain melakukan kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin dalam hal penyediaan tenaga dokter. Selain itu, mengusulkan ke kementerian terkait untuk menempatkan tenaga dokter di Kabupaten Kepulauan Selayar melalui rekrutmen maupun penempatan tugas dari daerah lain ke Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun upaya tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan tenaga dokter yang ada.

13. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk. Indikator ini menunjukkan ketersediaan tenaga medis untuk melayani penduduk. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, dari sisi ketersediaan tenaga medis sudah memadai, namun dari sisi penyebarannya sehingga mampu menjangkau seluruh penduduk belum merata. Hal ini disebabkan karena faktor geografis dimana belum semua pulau memiliki sarana dan fasilitas kesehatan, selain itu, akses perhubungan baik darat, maupun laut yang masih terbatas serta kondisi cuaca yang kadang tidak bersahabat.

Tabel 2.20
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	0,35	0,203	0,216	0,545	0,547

Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk selama rentang waktu 2016-2021 berfluktuasi. Kondisi ini dipengaruhi oleh variabel jumlah penduduk. Dinamika penduduk di Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan faktor berpengaruh naik turunnya rasio tenaga medis, selain juga karena faktor ketersediaan jumlah tenaga medis itu sendiri.

14. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Mampu Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani. Seperti halnya tenaga dokter, ketersediaan tenaga kebidanan di Kabupaten Kepulauan Selayar juga belum memadai. Belum semua desa memiliki petugas kebidanan. Hal tersebut, diperkuat dengan data cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani sesuai tabel berikut yang menunjukkan angka rata-rata 0,7 persen. Hal ini terjadi selain karena pengangkatan tenaga kebidanan yang masih terbatas, juga karena tingkat kelulusan calon bidang dalam uji sertifikasi profesi bidan yang relatif rendah setiap ada kesempatan ujian.

Tabel 2.21
Cakupan Komplikasi Kebidanan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	0,768	0,745	0,726	0,717	0,616

Faktor yang menjadi penyebab rendahnya cakupan komplikasi kebidanan antara lain karena:

- a. Masih terbatasnya tenaga bidan.
- b. Distribusi tenaga bidan yang belum merata, kebanyakan tenaga bidan yang ada bertugas di kota Benteng atau di daratan pulau selayar.

Masih terbatasnya tenaga bidan di kabupaten Kepulauan Selayar disebabkan oleh terbatasnya jumlah formasi pengangkatan tenaga kebidanan, serta rendahnya tingkat kelulusan calon bidang dalam uji sertifikasi profesi bidan pada setiap ada kesempatan ujian.

15. Cakupan Pertolongan Persalinan

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I

sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF).

Tabel 2.22
Cakupan Pertolongan Persalinan
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
2.	Pasilambena	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
3.	Pasimasunggu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
4.	Taka bonerate	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
5.	Pasimasunggu Timur	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
6.	Bontosikuyu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
7.	Bontoharu	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
8.	Benteng	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
9.	Bantomanai	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
10.	Bontomatene	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
11.	Buki	0,72	0,07	0,08	0,07	0,07
Cakupan Pertolongan Persalinan		0,800	0,861	0,906	0,840	0,840

Selama periode 2016-2021, cakupan pertolongan persalinan menurut kecamatan umumnya sama setiap tahunnya, kecuali pada tingkat kabupaten, dalam tiga tahun pertama mengalami kenaikan dan tahun berikutnya turun lagi.

Faktor utama penyebab naik atau turunnya realisasi cakupan pertolongan persalinan di kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

- a. Belum semua satuan pemukiman tersedia tenaga bidan;
- b. Akses jarak antara tempat tinggal ibu hamil dengan tempat pelayanan kesehatan yang relatif jauh atau sulit dikunjungi oleh tenaga bidan;
- c. Kondisi geografis dengan cuaca yang kurang bersahabat pada waktu-waktu tertentu.

16. Cakupan Desa / Kelurahan UCI

Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi yaitu *Universal Child Immunization* (UCI) desa/kelurahan. Desa/kelurahan UCI adalah Gambaran suatu desa/kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi (0-11 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Cakupan Desa/Kelurahan UCI
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
2.	Pasilambena	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
3.	Pasimasunggu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
4.	Taka bonerate	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
5.	Pasimasunggu Timur	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
6.	Bontosikuyu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
7.	Bontoharu	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
8.	Benteng	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
9.	Bontomanai	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
10.	Bontomatene	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
11.	Buki	0,07	0,08	0,08	0,81	0,08
Cakupan Desa/Kelurahan UCI Wilayah ber HPL/HGB		0,142	0,181	0,181	0,181	0,259

Cakupan Desa/Kelurahan UCI dari 88 Desa/Kelurahan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2016 sebanyak 68 Desa/Kelurahan (77,3%), pada tahun 2017 meningkat menjadi 81 Desa/Kelurahan (92%), pada tahun 2018 turun kembali menjadi 78 Desa/ Kelurahan (88,6%) dan pada tahun 2019 jumlahnya sebanyak 79 Desa/Kelurahan (89,8%). Tahun 2020 turun menjadi 75 Desa/Kelurahan atau sebesar 85,2 %.

Beberapa faktor yang menyebabkan meningkat dan menurunnya Desa/Kelurahan UCI di Kabupaten

Kepulauan Selayar disebabkan karena jumlah petugas imunisasi yang terlatih masih kurang selain itu petugas imunisasi mempunyai tugas rangkap dan adanya penggantian koordinator imunisasi disebabkan pindah tugas atau pensiun selain masalah intern masalah ekstern seperti adanya desa sulit tempat antara puskesmas menyeberangi lautan dan faktor cuaca sehingga pelayanan terhambat. Faktor lain yaitu biaya operasional untuk wilayah sulit yang masih kurang. Selain itu, maraknya isu terkait Vaksin MR (Measless Rubella) yang menimbulkan berkurangnya masyarakat yang mau mengantar anaknya untuk diimunisasi.

17. Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (Standar yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)

Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Pembangunan berkelanjutan yang memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Tabel 2.24

Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	75	60	55	50	50
2.	Pasilambena	75	60	55	50	50
3.	Pasimasunggu	75	60	55	50	50
4.	Taka bonerate	75	60	55	50	50
5.	Pasimasunggu Timur	75	60	55	50	50
6.	Bontosikuyu	75	60	55	50	50
7.	Bontoharu	75	60	55	50	50
8.	Benteng	75	60	55	50	50
9.	Bontomanai	75	60	55	50	50
10.	Bontomatene	75	60	55	50	50
11.	Buki	75	60	55	50	50
Proporsi penduduk dengan asupan kalori dibawah tingkat konsumsi minimum		4,18	3,92	3,92	3,82	3,72

Selama periode 2016-2021, Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari) di Kabupaten Kepulauan Selayar menurun setiap tahunnya. Faktor penyebab terjadinya penurunan dimaksud adalah:

- a. masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang makanan yang bergizi;
- b. kondisi geografis dengan tingkat ketersediaan pangan yang tidak merata diantara pulau-pulau yang berpenduduk.

18. Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Tabel 2.25
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
2.	Pasilambena	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
3.	Pasimasunggu	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
4.	Taka bonerate	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
5.	Pasimasunggu Timur	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
6.	Bontosikuyu	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
7.	Bontoharu	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
8.	Benteng	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
9.	Bontomanai	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
10.	Bontomatene	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
11.	Buki	6,35	7,27	7,72	8,09	8,54
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak		70	80	85	89	95

Selama periode 2016-2021 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terjadi kenaikan setiap tahunnya. Adanya peningkatan tersebut disebabkan oleh, beberapa faktor, antara lain:

- a. Semakin tingginya kesadaran keluarga dalam mengunjungi posyandu dan atau tempat pelayanan kesehatan terutama pada saat imunisasi;
- b. Dilaksanakannya program pelayanan imunisasi khususnya campak secara berkelanjutan oleh Dinas Kesehatan.

19. Cakupan Balita Pneumonia

Pneumonia merupakan peradangan pada parenkim paru distal dari bronkiolus terminalis yang meliputi bronkiolus respiratorius dan alveoli sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pertukaran gas setempat dan konsolidasi jaringan paru-paru. Kasus penemuan pneumonia pada balita di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rentang waktu 2016-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walaupun demikian, peningkatan penemuan pneumonia khususnya pada balita juga diringi dengan peningkatan cakupan pneumonia yang tertangani, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	6	0	2	0	0
2.	Pasilambena	0	0	0	1	0
3.	Pasimasunggu	0	0	16	14	0
4.	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5.	Pasimasunggu Timur	0	0	0	7	1
6.	Bontosikuyu	0	8	8	0	11
7.	Bontoharu	0	0	0	20	87
8.	Benteng	0	0	0	9	3
9.	Bontomanai	0	7	7	20	4
10.	Bontomatene	0	19	19	2	3
11.	Buki	0	0	1	0	4
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani		0,56	0,54	0,57	0,6	0,72

Kasus pneumonia pada balita di Kabupaten kepulauan Selayar terjadi disebabkan oleh faktor risiko intrinsik dan faktor risiko ekstrinsik. Faktor risiko ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari lingkungan sedangkan faktor risiko intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor risiko untuk pneumonia yang berasal dari lingkungan misalnya adalah polusi udara di rumah, kondisi fisik rumah misalnya ventilasi rumah dan

pencahayaan serta kepadatan hunian. Faktor yang berasal dari diri sendiri misalnya adalah status imunisasi serta status gizi.

20. Cakupan Penderita Tuberkulosis

Tuberkulosis merupakan penyakit yang menjadi perhatian global. Dengan berbagai upaya pengendalian yang dilakukan, Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Sumber penularan yaitu pasien TB BTA (bakteri tahan asam) positif melalui percik relik dahak yang dikeluarkannya. TB dengan BTA negatif juga masih memiliki kemungkinan menularkan penyakit TB meskipun dengan tingkat penularan yang rendah.

Tabel 2.27
Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit TBC dan BTA
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	5	7	32	18	5
2.	Pasilambena	1	1	18	15	8
3.	Pasimasunggu	9	2	28	9	21
4.	Taka bonerate	1	4	31	10	8
5.	Pasimasunggu Timur	2	12	12	12	12
6.	Bontosikuyu	7	9	17	24	11
7.	Bontoharu	5	10	8	24	21
8.	Benteng	5	43	62	70	40
9.	Bontomanai	10	6	7	18	17
10.	Bontomatene	5	7	23	17	13
11.	Buki	1	4	10	5	7
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA		0,800	0,768	0,409	0,487	0,475

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya. Terjadinya penurunan ini, disebabkan oleh semakin berkurangnya temuan kasus penderita TBC BTA di masyarakat, serta meningkatnya angka kesembuhan bagi penderita TBC BTA.

Prevalensi TBC di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.28
Prevalensi TBC
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	227,82	202,91	200,53	205,98	217,31
2.	Pasilambena	37,46	74,23	101,85	58,47	143,76
3.	Pasimasunggu	76,54	91,44	115,91	105,68	89,81
4.	Taka bonerate	31,47	46,99	280,09	23,28	116,76
5.	Pasimasunggu Timur	46,44	59,33	73,71	65,12	52,28
6.	Bontosikuyu	108,54	190,66	193,70	151,43	185,23
7.	Bontoharu	54,03	75,42	93,90	192,16	200,15
8.	Benteng	7,24	29,32	57,05	50,14	22,25
9.	Bontomanai	13,34	52,62	123,64	25,66	99,94
10.	Bontomatene	26,68	172,99	176,17	118,78	139,84
11.	Buki	15,67	62,39	74,60	15,47	103,83
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		77,50	103,01	124,69	103,23	129,15

Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia, dengan total angka kematian sekitar 98.000 atau setara dengan 11 kematian per jam. Berikut tingkat kematian karena TB di kabupaten Kepulauan Selayar kami sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2.29
Tingkat Kematian Karena TB
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	0	0	3,77	1,82	3,7
2.	Pasilambena	0	0	9,09	0	14,29
3.	Pasimasunggu	0	16,67	13,33	14,29	33,33
4.	Taka bonerate	50	0	5,56	33,33	12,5
5.	Pasimasunggu Timur	14,29	0	18,18	0	0
6.	Bontosikuyu	0	6,25	6,25	0	12,50
7.	Bontoharu	0	0	0	0	0
8.	Benteng	0	0	14,29	0	0
9.	Bontomanai	100	0	11,11	0	0
10.	Bontomatene	0	0	7,14	11,11	9,09
11.	Buki	0	0	20	0	28,57
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		3,92	2,19	8,02	4,29	10,73

21. Penderita Diare yang Ditangani

Diare merupakan gejala gangguan pada saluran pencernaan yang menyebabkan tinja seseorang berubah menjadi encer dan berair. Selain perubahan bentuk tinja, diare juga ditandai dengan perut mulas akibat gerakan saluran pencernaan yang menjadi lebih aktif. Diare yang berlangsung singkat biasanya bukan merupakan kondisi medis serius. Sebaliknya, diare yang berlangsung lama dan tidak ditangani dengan baik, dapat mengancam nyawa.

Tabel 2.30
Penderita Diare yang Ditangani
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	84	223	247	260	125
2.	Pasilambena	56	44	157	141	113
3.	Pasimasunggu	91	201	315	68	17
4.	Taka bonerate	68	65	189	324	135
5.	Pasimasunggu Timur	37	163	321	200	106
6.	Bontosikuyu	345	302	368	290	106
7.	Bontoharu	162	50	42	92	153
8.	Benteng	298	317	366	268	210
9.	Bantomanai	593	578	1044	576	376
10.	Bontomatene	633	724	833	576	376
11.	Buki	214	191	191	321	155
Penderita Diare yang Ditangani		0,5	0,7	0,6	0,5	0,9

Selama periode 2016-2021 terjadi fluktuasi dalam hal penderita diare tertangani. Kondisi dipengaruhi oleh faktor penemuan kasus yang jumlahnya berbeda-beda setiap tahunnya. Adapun penanganan terhadap penderita diare, dilakukan melalui:

- Anjuran agar penderita diare mengonsumsi makanan rendah serat
- Banyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi
- Menghindari minuman berkafein dan beralkohol
- Tidak makan berlebihan

22. Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (*Anopheles*) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa.

Tabel 2.31
Angka Kejadian Malaria
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	5	18	5	0	5
2.	Pasilambena	4	0	0	0	0
3.	Pasimasunggu	10	8	11	2	0
4.	Taka bonerate	0	2	4	0	0
5.	Pasimasunggu Timur	5	4	3	0	0
6.	Bontosikuyu	8	0	0	0	0
7.	Bontoharu	0	0	1	0	1
8.	Benteng	5	0	0	1	1
9.	Bontomanai	4	1	1	0	0
10.	Bontomatene	0	0	4	0	0
11.	Buki	0	0	1	4	0
Angka Kejadian Malaria		41	32	30	7	7

Angka Kejadian Malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rentang waktu 2016-2021 pada umumnya menurun kecuali pada tahun 2017 yang mengalami kenaikan dari 32 kasus pada tahun 2016 menjadi 41 kasus pada tahun 2017. Kasus kejadian malaria di Kabupaten Kepulauan Selayar umumnya terjadi karena faktor lingkungan yang kurang bersih sehingga menjadi sarang berkembangnya nyamuk malaria.

23. Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi

AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi HIV. Untuk mengetahui prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Prevalensi HIV/AIDS (persen)
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	0	2	0	4	4
2.	Pasilambena	0	0	1	4	4
3.	Pasimasunggu	0	0	3	0	0
4.	Taka bonerate	1	3	1	0	0
5.	Pasimasunggu Timur	0	3	2	7	7
6.	Bontosikuyu	1	0	0	1	1
7.	Bontoharu	0	0	0	0	0
8.	Benteng	0	2	2	5	5
9.	Bantomanai	0	1	1	1	1
10.	Bontomatene	0	0	0	0	0
11.	Buki	0	0	0	0	0
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0,007	0,004	0,006	0,007	0,005

Prevalensi HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016- 2021 berfluktuasi. Kasus HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Selayar terjadi umumnya karena ditemukan pada orang-orang dengan riwayat perjalanan pulang dari merantau. Dengan demikian, prevalensi HIV /AIDS dipengaruhi oleh jumlah orang yang datang dari rantau dengan indikasi terinfeksi HIV/AIDS. Walaupun terdapat juga kasus penemuan penderita HIV/AIDS akibat resiko aktivitas yang penderita lakukan sebelum terinfeksi.

24. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah rujukan pasien masyarakat miskin dibagi dengan jumlah pasien masyarakat miskin kali 100 di wilayah dalam kurun waktu yang sama. Adapun perkembangan realisasi Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin di Kabupaten Kepulauan Selayar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.33

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
2.	Pasilambena	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
3.	Pasimasunggu	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
4.	Taka bonerate	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
5.	Pasimasunggu Timur	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
6.	Bontosikuyu	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
7.	Bontoharu	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
8.	Benteng	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
9.	Bontomanai	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
10.	Bontomatene	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
11.	Buki	0,115	0,116	0,117	0,116	0,118
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin		0,115	0,116	0,117	0,116	0,118

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin selama periode 2016-2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar relatif masih rendah meningkat. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh faktor kondisi kesehatan masyarakat miskin itu sendiri. Walaupun demikian, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan, dari seluruh pasien miskin yang berobat, 100% tertangani.

25. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama. Adapun Cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 (empat) kali, pada kurun waktu 2016-2021 di Kabupaten Kepulauan Selayar, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.34
Cakupan Kunjungan Bayi
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
2.	Pasilambena	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
3.	Pasimasunggu	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
4.	Taka bonerate	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
5.	Pasimasunggu Timur	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
6.	Bontosikuyu	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
7.	Bontoharu	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
8.	Benteng	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
9.	Bontomanai	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
10.	Bontomatene	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
11.	Buki	1,029	0,924	0,934	0,915	0,930
Cakupan Kunjungan Bayi		1,029	0,924	0,934	0,915	0,930

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa cakupan kunjungan bayi selama periode 2016-2021 relatif tetap, kecuali dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan. Realisasi Cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Kepulauan Selayar, dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Tingkat kesadaran orang tua;
- b. Akses keluarga bayi dengan lokasi tempat pelayanan kesehatan;
- c. Kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggal keluarga bayi.

26. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa merebaknya suatu wabah penyakit.

Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004. Kejadian Luar Biasa dijelaskan sebagai timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.

Jenis penyakit yang pernah mengalami Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Kepulauan Selayar selama periode 2016-2021 antara lain: rabies, diare, malaria, dan demam berdarah.

Tabel 2.35

Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pasimarannu	0	0	1	0	0
2.	Pasilambena	1	0	0	0	0
3.	Pasimasunggu	0	0	0	0	0
4.	Taka bonerate	0	0	0	0	0
5.	Pasimasunggu Timur	0	0	0	0	0
6.	Bontosikuyu	0	0	0	0	0
7.	Bontoharu	0	0	0	0	0
8.	Benteng	1	1	0	0	1
9.	Bontomanai	0	0	0	0	0
10.	Bontomatene	0	0	0	0	0
11.	Buki	0	0	0	1	0
Desa/Kelurahan Mengalami KLB		2	1	1	1	1

Selama periode 2016-2021, Kabupaten Kepulauan Selayar, setiap tahunnya pernah mengalami KLB. Adapun bentuk penanganannya, adalah:

- a. Melakukan penyelidikan epidemiologis untuk mengetahui penyebabnya dan upaya antisipatif agar penyakit terkait tidak berulang;
- b. Perbaikan sarana dan prasarana air bersih dan atau air minum;
- c. Pembangunan jamban keluarga;
- d. Sosialisasi gerakan 1 rumah 1 jumantik;
- e. Sosialisasi penggunaan Kelambu;
- f. Pengadaan Vaksin Anti Rabies;
- g. Peningkatan kompetensi Petugas Kesehatan dalam penanganan KLB.

Tabel 2.36
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Angka Usia Harapan Hidup				67,52	67,54	67,56	67,57	67,58	69,80	69,81	68,03	68,34	68,46	1.03	1.03	1.006	1.01	1.01
2.	Persentase Balita Gizi Buruk				0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,07	0,08	0,05	0,12	0,09	1	1.33	0.8	0.33	2.25
3.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi				25	25	25	25	25	1.912	1.910	1.885	1.954	1.980	76.48	76.4	75.4	78.16	79.2
4.	Rasio Posyandu Per Satuan Balita				2,95	2,95	2,95	3,00	3,00	40,27	40,31	40,84	39,4	38,88	13.65	13.66	13.84	13.13	12.96
5.	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk				0,064	0,070	0,080	0,090	0,095	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1.56	1.42	1.25	1.11	1.05
6.	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk				0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
7.	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk				0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0,238	0,135	0,112	0,108	0,109	0.36	0.20	0.17	0.16	0.16
8.	Rasio Tenaga Medis Satuan Penduduk				1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	0,35	0,203	0,216	0,545	0,547	0.25	0.14	0.15	0.38	0.39
9.	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani				100	100	100	100	100	0.768	0.745	0.726	0.717	0.616	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006
10.	Cakupan Pertolongan Persalinan				87,28%	90%	90%	95%	95%	80%	86.1%	90.6%	84%	85,5%	0,91	0.95	1.006	0.88	0.9
11.	Cakupan Desa/Kelurahan UCI				78,41%	80%	85%	90%	95%	14,2%	18,1%	18,1%	18,1%	25,9%	0.18	0.22	0.21	0.20	0.27
12.	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
13.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA				53,33%	65%	70%	80%	90%	80%	76,8%	40,9%	48,7%	47,5%	1.5	1.18	0.58	0.6	0.52
14.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin				100%	100%	100%	100%	100%	11,5%	11,6%	11,7%	11,6%	11,8%	0.115	0.116	0.117	0.116	0.118
15.	Cakupan Kunjungan Bayi				99,95%	100%	100%	100%	100%	102,9%	92,4%	93,4%	91,5%	93%	1.02	0.92	0.93	0.91	0.93

Tabel 2.37

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	75.000.000	40.000.000	70.000.000	-	139.501.838	74.900.000	36.150.000	50.400.000	-	97.726.300	0,99	0,90	0,72	-	0,70	17 %	7 %
Program Pelayanan Kesehatan Ibu	20.000.000	478.000.000	380.000.000	1.356.825.000	35.850.000	16.660.000	476.003.600	295.832.043	314.693.105	0	0,83	0,99	0,77	0,23	0	16 %	166 %
Program Pelayanan Kesehatan Lansia	5.000.000	25.000.000	30.000.000	-	7.500.000	5.000.000	25.000.000	0	-	7.500.000	1	1	0	-	1	11 %	11 %
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.336.000.000	350.180.000	560.008.000	303.898.000	1.002.861.652	1.317.987.640	346.308.400	544.861.070	299.288.348	980.428.285	0,98	0,98	0,97	0,98	0,97	-7 %	-7 %
Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	-	295.540.000	504.540.000	196.161.815	201.260.000	-	294.408.700	440.114.843	195.249.015	194.706.007	-	0,99	0,87	0,99	0,96	-12 %	-13 %
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	35.000.000	-	-	-	-	34.940.000	-	-	-	-	0,99	-	-	-	-	0 %	0 %
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.160.215.000	34.907.998.000	43.823.425.000	50.409.065.279	64.389.416.152	2.948.691.733	29.795.160.128	29.984.728.788	31.562.134.579	45.702.306.064	0,47	0,85	0,68	0,62	0,7	80 %	98 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	213.500.000	741.657.850	931.990.600	1.022.615.000	472.185.450	163.327.500	716.170.259	902.017.880	1.007.004.000	472.185.450	0,76	0,96	0,96	0,98	1	22 %	30 %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.197.930.000	4.703.422.800	4.617.225.000	5.913.172.850	6.277.242.578	1.182.259.791	4.592.513.578	4.602.179.877	5.332.347.625	6.277.242.578	0,98	0,97	0,99	0,90	1	51 %	52 %
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	15.000.000	212.900.000	282.000.000	65.000.000	165.000.000	15.000.000	200.200.000	253.108.000	63.700.000	162.200.000	1	0,94	0,89	0,98	0,98	82 %	81 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	2.000.000	49.000.000	46.000.000	64.000.000	37.000.000	2.000.000	48.600.000	45.295.000	63.796.000	36.545.000	1	0,99	0,98	0,99	0,98	107 %	107 %
Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	1.700.000.000	3.057.400.000	3.643.400.000	3.931.200.000	3.326.600.000	1.222.750.000	2.762.590.000	3.458.771.000	3.299.686.000	3.046.900.000	0,71	0,90	0,94	0,83	0,91	18 %	26 %
Program Pengawasan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.972.511.000	2.587.269.520	187.609.000	50.000.000	2.034.061.035	1.815.490.024	616.298.052	185.584.100	49.550.000	1.955.392.747	0,92	0,23	0,98	0,99	0,96	1 %	2 %
Program Pembangunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Puskesmas dan Jaringannya	21.545.066.50 0	14.187.148.30 6	13.401.683.91 0	12.089.367.42 9	16.778.641.08 0	10.493.635.09 8	13.369.786.82 0	13.188.507.04 0	11.798.286.77 3	14.088.818.49 4	0,48	0,94	0,98	0,97	0,83	-6 %	8 %
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	977.465.000	700.000.000	513.043.000	50.000.000	91.600.000	952.474.400	679.795.000	356.854.400	50.000.000	91.600.000	0,97	0,97	0,69	1	1	-45 %	-44 %
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.140.305.500	3.109.402.000	4.722.975.000	5.119.200.000	4.572.863.855	1.133.864.560	2.934.263.967	4.660.664.544	5.051.600.155	4.572.863.855	0,99	0,94	0,98	0,98	1	42 %	42 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	42.740.000	-	-	-	-	42.740.000	-	-	-	-	1	-	-	0 %	0 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Kesehatan

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Tantangan

Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama harus sesuai dengan standar, Pemenuhan terhadap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai dengan standar.

2. Peluang

Terdapat komitmen global, regional, nasional dan daerah menyangkut masalah kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan. Kelanjutan Komitmen global SDG's tahun 2020 adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 goals. Dari Tujuh belas point komitmen, empat diantaranya adalah masalah kesehatan yaitu (1) Mengahiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan (2) Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang disegala usia (3) Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita (4) Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.

Adanya bantuan program DAK (Fisik dan Non Fisik) bidang kesehatan dari Pemerintah Pusat dalam pembangunan kesehatan di daerah dan Adanya kebijakan pemerintah yang menempatkan pembangunan kesehatan sebagai bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
DINAS KESEHATAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan bertugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan atas desentralisasi, dekonstrasi, dan tugas perbantuan. Agar tugas tersebut dapat terselenggara maka dinas kesehatan berfungsi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang meliputi pelayanan kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan kesehatan olahraga, kesehatan masyarakat serta sumberdaya kesehatan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, identifikasi permasalahan ada di lima aspek, antara lain;

1. Dana Operasional Terutama di Puskesmas dan Jaringannya (Posyandu) Terbatas Sehingga Pengelolaan Sarana Tidak Optimal.
2. Masih Terbatasnya Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk Penyakit Tertentu.
3. Distribusi Tenaga Kesehatan, Tenaga Dokter dan Bidan yang Belum Merata Terutama di Wilayah Kepulauan.
4. Proses Rujukan Pasien yang Belum Optimal.
5. Informasi Kesehatan Belum Merata Menjangkau Lapisan Masyarakat.

Pada aspek pelayanan kesehatan masalah mendasar ialah pelayanan kesehatan yang belum optimal. Akses pelayanan kesehatan ke puskesmas belum memadai terutama di daerah kecamatan kepulauan. Kendala yang di hadapi ialah sulitnya medan dan kondisi wilayah yang masih terpencil, sehingga hal ini berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil dan kepulauan.

Pada aspek Kesehatan Masyarakat, permasalahan mendasar ialah belum optimalnya implementasi pendekatan pelayanan siklus kehidupan (*Continuum of Care*) yakni upaya pelayanan kesehatan sejak dalam

kandungan, bayi, balita, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, hingga Lansia. Kekurangan gizi dan masalah Stunting adalah masalah yang sangat mengemuka di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini.

Pada aspek sumber daya kesehatan, permasalahan utama adalah kualitas sumber daya manusia kesehatan yang belum optimal serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Pada daerah tertentu di fasilitas pelayanan kesehatan masih banyak ditemukan kendala antara lain kekurangan dokter, tenaga perawat, ataupun tenaga kesehatan lainnya. Demikian halnya dengan kualitas tenaga kesehatan yang perlu terus di tingkatkan demi menjamin pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektif, efisien, dan memuaskan masyarakat.

Pencegahan dan pengendalian penyakit terkait dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular, masih tingginya kasus penyakit menular seperti HIV, dan TB di Selayar serta tingginya angka penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus terutama di daerah Kepulauan. Bahkan saat ini jauh lebih berat lagi dengan mewabahnya pandemi COVID-19 yang sangat memberikan dampak besar tidak hanya di sektor kesehatan, akan tetapi juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan, perekonomian, pariwisata, perdagangan, perhubungan dan berbagai sektor lainnya.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Dana Operasional Terutama di Puskesmas dan Jaringannya (Posyandu) Terbatas Sehingga Pengelolaan Sarana Tidak Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Dana Operasional yang Tersedia 2. Penyebaran Dana yang Tidak Sesuai 3. Pemanfaatan Dana yang Tidak Tepat 4. Pengelolaan Dana yang Belum Sempurna 5. Semakin Tingginya Biaya Kesehatan 	Alokasi Anggaran dan Pendanaan Kesehatan Oleh Pemerintah Belum Mencukupi Biaya Operasional Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
2.	Masih Terbatasnya Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk Penyakit Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum Optimalnya Penyediaan Alat Kesehatan Untuk Penanganan Penyakit Tertentu 2. Kondisi Wilayah yang Sulit Dijangkau 3. Tingginya Biaya Untuk Penanganan Penyakit Tertentu 4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat 	Belum Optimalnya Pembiayaan Kesehatan Untuk Penanganan Penyakit Tertentu
3.	Distribusi Tenaga Kesehatan, Tenaga Dokter dan Bidan yang Belum Merata Terutama di Wilayah Kepulauan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendayagunaan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Berkualitas yang Masih Kurang 2. Pengembangan Karir, Sistem Penghargaan dan Sanksi yang Belum Tegas Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Adanya Migrasi (Perpindahan) Tenaga Kesehatan Antar Daerah 4. Masih Banyaknya Dokter yang Enggan Ditugaskan di Wilayah Pedalaman dan Kepulauan 	Sistem Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (Dokter dan Bidan) yang Masih Lemah dan Belum Terkoordinasi Dengan Baik
4.	Proses Rujukan Pasien yang Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Tingginya Puskesmas yang Melakukan Tindak Rujukan yang Tidak Perlu (Penyakit Non 	Belum Optimalnya Manajemen dan Koordinasi

		<p>Spesialistik) ke Rumah Sakit</p> <p>2. Penerapan Rujukan Elektronik yang Belum Berjalan Secara Maksimal</p> <p>3. Masih Tingginya Biaya Transportasi Rujukan Akibat Kondisi Geografi dan Topografi yang Sulit Dijangkau</p>	Pelaksanaan Rujukan Antara Puskesmas dan Rumah Sakit
5.	Informasi Kesehatan Belum Merata Menjangkau Lapisan Masyarakat	<p>1. Belum Optimalnya Promosi Kesehatan</p> <p>2. Terbatasnya Tenaga Kesehatan Berakibat Pada Banyaknya Masyarakat Tidak Tersentuh Informasi Kesehatan</p>	Belum Optimalnya Sistem Informasi Kesehatan yang Menjangkau Lapisan Masyarakat

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Strategis adalah bentuk operasionalisasi dari RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan penjabaran terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terpilih. Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026, Kepala Daerah terpilih telah menetapkan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan visi yang ingin dicapai yaitu *“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”*.

Dalam rumusan visi ini terdapat 2 (dua) pokok visi yakni “Bandar Maritim” dan “Kawasan Timur Indonesia”. Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2022 – 2026, merumuskan dan menetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun uraian ke-6 (ke enam) misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, diuraikan sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Misi ke-1 RPJMD ini, memuat 1 (satu) tujuan yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah (T-1) dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ke-1 ini memuat 1 sasaran yaitu Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan (S-1), dengan 3 (tiga) indikator masing-masing : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat, 2. Nilai SAKIP Daerah, dan 3. Opini BPK.

Misi ke-2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Misi ke-2 RPJMD ini, memuat 2 (dua) tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan Kapasitas dan Fasilitas Perdesaan (T-2) dengan 2 indikator yaitu Angka Kemiskinan dan Rasio Gini. Tujuan ke-2 memuat 1 sasaran yaitu Meningkatkan kapasitas dan fasilitas perdesaan (S-2) dengan indikator Indeks Desa Membangun.
- b. optimalkan Pengelolaan Sumberdaya Lokal (T3) dengan 1 indikator yaitu PDRB / Kapita. Tujuan ke-3 ini memuat 1 sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas SDM dan Fasilitas Perekonomian Pedesaan (S-3) dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Misi ke-3 RPJMD memuat 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (T-4) dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan ke-4 dari RPJMD ini memuat 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai, masing-masing :

- a. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat (S-4) dengan 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan.
- b. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat (S-5) dengan indikator yaitu Pengeluaran Perkapita.

Misi ke-4 : Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Misi ke-4 RPJMD ini, memuat 1 (satu) tujuan yaitu Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman (T5) dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Tujuan ke-5 ini juga memuat 3 (tiga) sasaran masingmasing :

- a. Meningkatnya Usaha Perikanan (S-6) dengan indikator yaitu Presentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB.
- b. Meningkatnya usaha pariwisata (S-7) dengan indikator yaitu Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten.
- c. Meningkatnya Usaha Kepelabuhanan (S-8) dengan indikator Presentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, transportasi dan perdagangan terhadap PDRB.

Misi ke-5 : Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ke-5 dari RPJMD ini, memuat 2 (dua) tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan aktualisasi (T-6) dengan indikator Pembangunan Kebudayaan. Tujuan ke-6 memuat 1 sasaran yaitu Meningkatnya upaya pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dengan mengaktualisasikan pada kehidupan sosial (S-9) dengan indikator Indeks Ketahanan Sosial.

- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keagamaan (T-7) dengan 1 indikator yaitu Indeks Kesalehan Sosial. Tujuan ke-7 ini memuat 1 sasaran yaitu Meningkatnya toleransi kehidupan sosial kemasyarakatan (S-10) dengan indikator Angka Kriminalitas.

Misi ke-6 : Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Misi ke-6 dari RPJMD ini, memuat 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup (T-8) dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah. Tujuan ke-8 ini memuat 1 (satu) sasaran yaitu Menurunnya tingkat perusakan lingkungan hidup dan pencemaran serta meningkatnya mitigasi lingkungan (S11) dengan 3 (satu) indikator yaitu 1. Indeks Kualitas Air, 2. Indeks Kualitas Udara, dan 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 4 (empat) program prioritas dalam pembangunan daerah. Program prioritas dimaksud terdiri dari tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan sebagai penopang dari Visi Bandar Maritim. Program prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah tersebut sebagai pendekatan pembangunan wilayah yang akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu:

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu :
 - a. Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng.
 - b. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata Kecamatan Bontomatene, berupa:

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
 - b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
 - c. Terbangunnya fasilitas pergudangan dan penumpang.
 - d. Tersedianya kapal pengangkut barang dan penumpang.
 - e. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu :
- a. Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang.
 - b. Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya.
 - c. Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang.
 - d. Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang.
 - e. Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi.
 - f. Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi.
 - g. Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi–Gusung Kecamatan Bontoharu, berupa:

- a. Terbentuknya kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.
 - b. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
 - c. Dimulainya pembangunan fasilitas hunian.
 - d. Dimulainya pembangunan pelabuhan pariwisata.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu :
- a. Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang.
 - b. Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi.
 - c. Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea.
 - d. Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate.
 - e. Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.

Gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada pembangunan KIPT di tahun 2026, ditandai dengan keluaran terbentuknya dasar pembangunan Kawasan Industri Perikanan

Terpadu (KIPT) di Hangkoang Kecamatan Bontosikuyu, berupa:

- a. Tersedianya lahan untuk kawasan.
- b. Tersedianya kajian dan kelengkapan administrasi pembentukan kawasan.
- c. Dimulainya pembangunan prasarana dasar kawasan.
- d. Dimulainya pembangunan pelabuhan perikanan.
- e. Dimulainya pembangunan fasilitas industri perikanan.

4. GERBANG SARI

Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANG SARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dari dua dimensi pelaksanaan tersebut adalah pembangunan dan peningkatan prasarana perdesaan, penataan kawasan permukiman, dan pembangunan ekonomi perdesaan. Program Gerbang Sari dilaksanakan melalui penyediaan payung hukum petunjuk pelaksanaan, dianggarkan melalui APBD atau sumber pendanaan lain yang sah. Sementara itu kegiatan OPD yang lingkup kegiatannya sama atau sejalan dapat diintegrasikan ke dalam program Gerbang Sari.

Sebagai indikator capaian dari program Gerbangsari ini diantaranya meningkatnya penyediaan lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Alam, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya kesehatan lingkungan permukiman.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh

perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya.
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi.
2. Menurunkan Angka Stunting Pada Balita.
3. Memperbaiki Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Meningkatkan Kemandirian dan Penggunaan Produk Farmasi dan Alat Kesehatan Dalam Negeri.

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan guna mewujudkan Misi Presiden dan Bidang Kesehatan adalah:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kegawat daruratan kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan sumber daya kesehatan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tahun 2020-2024 Kementerian Kesehatan memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

1. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu.
2. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup.
3. Peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan.
4. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan sumber daya kesehatan.
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat.
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada Visi, Misi Gubernur Sulawesi Selatan. Adapun visi Gubernur Sulawesi Selatan adalah:

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Untuk mencapai Visi Pembangunan tersebut, Provinsi Sulawesi Selatan mengembang sejumlah Misi Pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.
2. Mewujudkan infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel.
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif.
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter.
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Perkembangan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Indonesia ditandai dengan adanya *window opportunity* dimana rasio ketergantungannya positif, yaitu jumlah penduduk yang produktif lebih banyak daripada usia non produktif.

2. Disparitas Status Kesehatan Antar wilayah

Meskipun secara nasional kualitas kesehatan masyarakat telah meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat social ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan – pedesaan masih cukup tinggi.

3. Jaminan Kesehatan Nasional

Ketersediaan dan keterjangkuan pelayanan kesehatan atau *supply side* dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih menjadi kendala di beberapa daerah, termasuk pembiayaan.

4. Pembagian urusan Pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal

Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan yang dibagi atas pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

5. Pembangunan Kesehatan dengan Pendekatan Keluarga

Penyelenggaraan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komperhensif, meliputi pelayanan promotif, preventif, serta pelayanan kuratif dan rehabilitatif dasar.

2. Reformasi Birokrasi

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi 2010-2025, kebijakan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui pemantapan pelaksanaan birokrasi.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Menganalisis permasalahan yang terjadi, dapat dikemukakan isu strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Pencegahan dan pengendalian pandemi kesehatan.
4. Pencapaian SPM dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).
5. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita Stunting.
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026, telah ditetapkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yaitu "*Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia*". Sedangkan dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan.
6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelayanan Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2021 – 2026, yaitu :

Misi ke-1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pelayanan Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-1, terkait dengan **tujuan ke-1** : mewujudkan reformasi birokrasi daerah (T-1) dengan **sasaran ke-1**, yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1).

Misi ke-3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pelayanan Dinas Kesehatan yang bersinergi dengan pelaksanaan misi ke-3, terkait dengan **tujuan ke-4** : meningkatkan fasilitas pembangunan sumber daya manusia (T-4) dengan **sasaran ke-4**, yaitu meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia (S-4).

Dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2021 – 2026 yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Kesehatan seperti yang dikemukakan di atas maka dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan.

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Penjelasan Indikator Jangka Menengah Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan Indikator
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	Angka Harapan Hidup di Tahun Akhir RPJMD
	Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	Jumlah Seluruh Kematian Ibu Terhadap Seluruh Kelahiran Hidup per 100.000
		Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	Jumlah Seluruh Kematian Bayi Terhadap Seluruh Kelahiran Hidup per 1.000
	Meningkatnya Status Gizi Balita	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	Jumlah Balita (0-59 Bulan) Dengan Kategori Status Gizi Kurang (BB/TB <- 3SD) Terhadap Seluruh Jumlah Balita (0-59 Bulan) yang Ditimbang
		Persentase Balita Gizi Buruk (Sangat kurus)	%	Jumlah Balita (0-59 Bulan) Dengan Kategori Status Gizi Sangat Kurus (BB/TB <-3SD) Terhadap Seluruh Jumlah Balita (0-59 Bulan) yang

				Ditimbang
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Tipe (Success Rate)	%	Jumlah Pasien TB yang Menyelesaikan Pengobatan (Baik yang Sembuh Maupun Pengobatan Lengkap) Terhadap Seluruh Pasien TB
		Persentase Desa/Kelurahan UCI	%	Jumlah Seluruh Desa/Kelurahan Terhadap Seluruh Desa/Kelurahan
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase Pelayanan Hipertensi	%	Jumlah Penderita Hipertensi Usia > 15 Tahun yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Terhadap Seluruh Estimasi Penderita Hipertensi Usia > 15 Tahun
	Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	%	Jumlah Rumah Tangga yang BerPHBS Terhadap Jumlah Rumah Tangga di Data
	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kualitas Manajemen Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	Hasil Perhitungan Terhadap Parameter IKM

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup	68,97	69,23	69,48	69,74	70
		Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	190/100.000 KH	180/100.000 KH	170/100.000 KH	160/100.000 KH	150/100.000 KH
		Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4,4/1000 KH	4,3/1000 KH	4,2/1000 KH	4,1/1000 KH	4/1000 KH
		Meningkatnya Status Gizi Balita	Prevalensi Balita Gizi Kurang	4	3,5	3	2,5	2
			Persentase Balita Gizi Buruk	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,5 %	0,4 %
		Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>succes rate</i>)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
			Persentase Desa/Kelurahan UCI	85 %	90 %	95 %	90 %	100 %
		Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Persentase Pelayanan Hipertensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		Meningkatnya PHBS Rumah Tangga	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	67 %	69 %	71 %	73 %	75 %
		Meningkatkan Kinerja Aparatur dan Kualitas Manajemen Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	1,5	2	2,5	3	3,5

Tabel 4.3
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Tahun 2022-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Usia Harapan Hidup	68,97	69,23	69,48	69,74	70
		Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	190/100.000 KH	180/100.000 KH	170/100.000 KH	160/100.000 KH	150/100.000 KH
			Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	4,4/1000 KH	4,3/1000 KH	4,2/1000 KH	4,1/1000 KH	4/1000 KH
			Prevalensi Balita Gizi Kurang	4	3,5	3	2,5	2
			Persentase Balita Gizi Buruk	0,8 %	0,7 %	0,6 %	0,5 %	0,4 %
			Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (<i>succes rate</i>)	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
			Persentase Desa/Kelurahan UCI	85 %	90 %	95 %	90 %	100 %
			Persentase Pelayanan Hipertensi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Rumah Tangga BerPHBS	67 %	69 %	71 %	73 %	75 %

		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM Aktif	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kesehatan	Nilai Sakip OPD	60,00 (B)	65,00 (B)	70,00 (B)	75,00 (B)	80,00 (B)
			Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00
			Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengacu kepada bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan. Strategi dan arahan kebijakan yang ditetapkan dianalisis menggunakan analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Oportunitis, dan Treast*).

Tabel 5.1
Analisis SWOT

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O) : 1. Regulasi yang mendukung 2. Dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan kesehatan 3. Koordinasi antara instansi baik Pusat, Daerah dan Stakeholders	Tantangan (T) : 1. Pandemi kesehatan 2. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap kesehatan (PHBS) 3. Jumlah penduduk yang besar 4. Perubahan nilai sosiokultural masyarakat (perubahan <i>needs</i> dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, era global <i>digital brain</i> , meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat
	Kekuatan (S) : 1. Struktur organisasi memadai 2. Terdapatnya jumlah tenaga dan kualitas memadai 3. Terdapatnya jumlah sarana dan prasarana yang memadai 4. Kinerja pelayanan rata-rata mencapai target yang ditetapkan	Alternatif Strategi (S-O) : 1. Peningkatan kualitas SDM kesehatan 2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
Kelemahan (W) : 1. Tata kelola organisasi belum optimal 2. Distribusi tenaga yang belum merata 3. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah	Kelemahan : 1. Optimalisasi tata kelola organisasi 2. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan 3. Optimalisasi fungsi pengelolaan aset daerah	Alternatif Strategi (W-T) : 1. Perlu peningkatan kualitas SDM 2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 3. Pemerataan distribusi tenaga kesehatan

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut tabel arah kebijakan Dinas Kesehatan mengacu pada Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam RPJMD periode tahun 2021-2026.

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan

Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah dan Sumber Daya Manusia Aparatur	Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan, Koordinasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan Serta Pengendalian Penyakit	Peningkatan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kualitas SDM Kesehatan Serta Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan
		Meningkatkan Upaya Promotif dan Preventif	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 5.3

Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kesehatan

Visi : Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat	1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan. 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kader serta Insentif Kader. 3. Meningkatkan Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 4. Mengoptimalkan Pelaksanaan Program Perbaikan Gizi. 5. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dengan Mengutamakan Pendekatan Faktor Risiko.	1. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil. 2. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin. 3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir. 4. Meningkatkan Jaminan Persalinan. 5. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Balita. 6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. 7. Meningkatkan Program Penyuluhan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Lintas Sektor.

			<p>8. Meningkatkan Pengelolaan Surveilans Kesehatan.</p> <p>9. Meningkatkan Pelaksanaan Gerakan Hidup Sehat dalam rangka Promotif dan Preventif.</p> <p>10. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.</p> <p>11. Meningkatkan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV.</p> <p>12. Meningkatkan Pelayanan Vaksin dan Imunisasi.</p> <p>13. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada usia produktif.</p> <p>14. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.</p>
--	--	--	---

			<p>15. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.</p> <p>16. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.</p> <p>17. Meningkatkan pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</p> <p>18. Penguatan Sistem Rujukan yang Efektif dan Efisien.</p>
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan.	<p>1. Mengembangkan dan melaksanakan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).</p> <p>2. Meningkatkan Kegiatan Promosi Kesehatan di Masyarakat.</p>
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi Birokrasi	1. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan	1. Optimalisasi Pelayanan Kepada Masyarakat Melalui Peningkatan	1. Meningkatkan Kualitas dan Keprofesionalan Aparatur

Daerah	Dinas Kesehatan.	<p>SDM Aparat, Efisiensi dan Efektivitas Birokrasi dan Pemanfaatan IT.</p> <p>2. Peningkatan Manajemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>3. Peningkatan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan.</p>	<p>Pemerintah.</p> <p>2. Menciptakan Kebijakan-Kebijakan yang Mendukung Terselenggaranya Peningkatan Kualitas Pelayanan.</p> <p>3. Meningkatkan Fasilitas Penunjang Pelayanan.</p> <p>4. Pengembangan dan Implementasi <i>E-Government</i>.</p> <p>5. Penginternalisasian Pemerintahan yang Bersih dan Berakuntabilitas.</p> <p>6. Penguatan Koordinasi dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.</p> <p>7. Peningkatan Keterampilan Aparatur Dalam Mengelola Keuangan.</p>
--------	------------------	---	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program

6.1.1. Rencana Program Dinas Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Program Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan dan Minuman.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

6.1.2. Rencana Program RSUD K.H Hayyung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

6.2. Kegiatan

6.2.1. Kegiatan Dinas Kesehatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan.
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah.
 - d. Penataan Organisasi.
 - e. Adminstrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Administrasi Perkantoran.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - i. Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada OPD Perangkat Daerah.

2. Program Upaya Pemenuhan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan untuk UKM dan UKPKewenangan Daerah.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Penertiban izin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
 - a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum
 - a. Pemberiaan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal Mikroobat Tradisional.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - a. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten.

6.2.2. Kegiatan RS K.H Hayyung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
 - a. Administarasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - b. Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan.
 - e. Peningkatan Pelayanan BLUD.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP.
 - b. Penyediaan layanan kesehatan rujukan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat pertama.
 - c. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an	Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penangu ng Jawab	Lokasi
							Targe t	Rp	Targe t	Rp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase peningkatan laporan capaian Keuangan		100	52,338,995,303	100	53,055,516,149	100	54,383,495,718	100	55,688,155,780	100	57,016,875,177	100	57,016,875,177	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		1	a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan evaluasi Perangkat Daerah		100	672,116,155	100	71,696,510	100	864,513,795	100	1,009,476,024	100	1,157,111,512	100	1,157,111,512	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahun OPD (Renja Pokok dan Renja Perubahan)		100	236,645,859	100	244,119,918	100	268,712,132	100	292,872,503	100	317,478,417	100	317,478,417	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perangkat Daerah		100	32,474,059	100	39,948,118	100	64,540,332	100	88,700,703	100	113,306,617	100	113,306,617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA Perubahan Perangkat Daerah		100	32,474,059	100	39,948,118	100	64,540,332	100	88,700,703	100	113,306,617	100	113,306,617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA Pokok dan Perubahan		100	32,474,059	100	39,948,118	100	64,540,332	100	88,700,703	100	113,306,617	100	113,306,617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Profil Dinkes dan Puskesmas dan SPM		100	305,574,059	100	313,048,118	100	337,640,332	100	361,800,703	100	386,406,617	100	386,406,617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Capaian Laporan Kinerja		100	32,474,059	100	39,948,118	100	64,540,332	100	88,700,703	100	113,306,617	100	113,306,617	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		2	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100	36,716,113,427	100	36,795,726,854	100	36,943,280,139	100	37,088,242,368	100	37,235,877,856	100	37,235,877,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji PNS		100	36,491,451,678	100	36,501,403,356	100	36,537,967,794	100	35,556,422,230	100	36,556,422,230	100	36,556,422,230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			8	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Tersedianya Bahan Pelaksanaan Verifikasi		100	109,951,678	100	119,903,356	100	138,347,516	100	156,467,794	100	174,922,230	100	174,922,230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			9	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Terlaksananya Perjurnalan Keuangan		100	19,951,678	100	29,903,356	100	48,347,516	100	66,467,794	100	84,922,230	100	84,922,230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksaan		100	14,951,678	100	24,903,356	100	43,347,516	100	61,467,794	100	79,922,230	100	79,922,230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			11	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester	Terpantaunya Pelaporan Keuangan Baik Perbulan Maupun Persemester		100	24,951,678	100	34,903,356	100	53,347,516	100	71,457,794	100	89,922,230	100	89,922,230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			12	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Terlapornya Realisasi Anggaran		100	17,951,678	100	27,903,356	100	46,347,516	100	64,467,794	100	82,922,230	100	82,922,230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			13	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Aset dan Laporan Keuangan yang Disusun		100	19,951,678	100	29,903,356	100	48,347,516	100	66,467,794	100	84,922,230	100	84,922,230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			14	Penyusunan Lakip	Tersedianya Dokumen Lakip		100	16,951,678	100	26,903,356	100	45,347,516	100	63,467,794	100	81,922,230	100	81,922,230	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		3	c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kinerja dan Profesionalismenya		100	506,113,427	100	585,726,854	100	733,280,139	100	878,242,368	100	1,025,877,856	100	1,025,877,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			15	Pendataan dan Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian	Tersedianya Data Adminstrasi Kepegawaian		100	348,037,809	100	374,575,618	100	423,760,046	100	472,080,789	100	521,292,618	100	521,292,618	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			16	Monitoring dan Evaluasi dan Penilaian Kerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring dan Penilaian Kinerja		100	61,537,809	100	88,075,618	100	137,260,046	100	185,580,789	100	234,792,618	100	234,792,618	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			17	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan		100	96,537,809	100	123,075,618	100	172,260,046	100	268,901,532	100	318,113,361	100	318,113,361	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		4	d	Penataan Organisasi	Terciptanya Desain Organisasi yang Mendukung Kinerja OPD		100	224,613,427	100	304,226,854	100	451,780,139	100	596,742,368	100	744,377,856	100	744,377,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			18	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Bagi Tenaga Kesehatan di 14 UPTD Puskesmas	Terlaksananya Kegiatan Monev di 14 UPTD Puskesmas		100	224,613,427	100	304,226,854	100	451,780,139	100	596,742,368	100	744,377,856	100	744,377,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		5	e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselenggarakan		100	1,498,228,028	100	1,577,841,455	100	1,725,394,740	100	1,870,356,969	100	2,017,992,457	100	2,017,992,457	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			19	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Untuk Gedung Kantor Dinkes dan RS Pratama		100	470,402,904	100	483,671,808	100	508,264,022	100	532,424,393	100	557,030,304	100	557,030,304	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Penggandaan Dinkes, Gudang Farmasi dan RS Pratama		100	48,468,905	100	61,737,809	100	86,330,023	100	110,490,394	100	135,096,305	100	135,096,305	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bacaan dan Perundang-Undangan		100	42,968,904	100	56,237,800	100	80,830,014	100	104,990,412	100	129,596,323	100	129,596,323	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			22	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan Peralatan Kantor		100	25,868,904	100	39,137,808	100	63,730,022	100	87,890,393	100	112,496,304	100	112,496,304	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			23	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan Minum Tamu		100	23,268,904	100	36,537,808	100	61,130,022	100	85,290,393	100	134,502,215	100	134,502,215	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			24	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100	887,249,504	100	900,518,408	100	925,110,622	100	949,270,993	100	973,876,904	100	973,876,904	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		6	f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	139,013,427	100	218,626,854	100	366,180,139	100	511,142,368	100	658,777,856	100	658,777,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Tempat Parkir Dinkes		100	139,013,427	100	218,626,854	100	366,180,139	100	511,142,368	100	658,777,856	100	658,777,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		7	g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	11,590,951,427	100	11,670,564,854	100	11,819,118,139	100	11,964,080,368	100	12,111,715,856	100	12,111,715,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			26	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100	663,754,713	100	703,561,426	100	777,838,068	100	850,319,182	100	924,136,926	100	924,136,926	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			27	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penunjang Administrasi Perkantoran		100	10,927,196,713	100	10,967,003,426	100	11,041,280,068	100	11,113,761,182	100	11,187,578,926	100	11,187,578,926	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		8	h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	923,787,127	100	1,003,400,554	100	1,150,953,839	100	1,295,916,068	100	1,443,551,556	100	1,443,551,556	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Mobil Jabatan, Mobil & Motor Dinkes dan Puskesmas		100	484,145,805	100	510,683,614	100	559,868,042	100	608,188,785	100	657,400,614	100	657,400,614	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			29	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor		100	359,223,509	100	385,761,318	100	434,945,746	100	483,266,489	100	532,478,318	100	532,478,318	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			30	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor (AC, Laptop dan Printer)		100	80,417,809	100	106,955,618	100	156,140,046	100	204,460,789	100	253,672,618	100	253,672,618	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		9	i	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100	353,211,427	100	432,824,854	100	580,378,139	100	725,340,368	100	772,975,856	100	772,975,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			31	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		100	353,211,427	100	432,824,854	100	580,378,139	100	725,340,368	100	772,975,856	100	772,975,856	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terpenuhinya Layanan Pada 12 Indikator SPM		100	110,230,872,000	100	111,639,932,638	100	99,436,783,152	100	117,184,520,579	100	119,982,929,240	100	119,982,929,240	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		10	j	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah yang Dilaksanakan		100	24,436,142,582	100	24,905,829,461	100	24,901,761,745	100	30,817,674,220	100	31,750,477,107	100	31,750,477,107	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			32	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Persentase Rumah Dinas Untuk Tenaga Kesehatan		100	134,098,125	100	201,196,250	100	200,615,148	100	1,045,745,501	100	1,179,003,056	100	1,179,003,056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			33	Pengembangan Puskesmas	Persentase Pengembangan Puskesmas		100	257,098,125	100	324,196,250	100	323,615,148	100	1,168,745,501	100	1,302,003,056	100	1,302,003,056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Ramah Anak Pada Puskesmas	Persentase Pengadaan Ramah Anak Pada Puskesmas		100	112,366,041	100	112,388,407	100	112,194,707	100	393,904,824	100	438,324,009	100	438,324,009	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Inspeksi Sarana dan Surveilans Produk dan Pengendalian Perizinan	Persentase Pertemuan Peningkatan Kemampuan SDM Dalam Melakukan Inspeksi Sarana dan Surveilans Produk dan Pengendalian Perizinan		100	72,366,041	100	72,388,407	100	72,194,707	100	353,904,824	100	398,324,009	100	398,324,009	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pertemuan Pembekalan CDAKB Untuk Pengelola Program di Puskesmas	Persentase Pertemuan Pembekalan Untuk Pengelola Program di Puskesmas		100	72,366,041	100	72,388,407	100	72,194,707	100	353,904,824	100	398,324,009	100	398,324,009	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			34	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Persentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		100	1,042,098,125	100	1,109,196,250	100	1,108,615,148	100	1,953,745,501	100	2,087,003,056	100	2,087,003,056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			35	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Pembangunan Sarana Kesehatan Lainnya		100	1,217,098,125	100	1,284,196,250	100	1,283,615,148	100	2,128,745,501	100	2,262,003,056	100	2,262,003,056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Mobiler Untuk PKM dan Jaringannya	Persentase Pengadaan Mobiler Untuk PKM dan Jaringannya		100	216,774,531	100	233,549,062	100	233,403,787	100	444,686,375	100	478,000,763	100	478,000,763	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembangunan Ruang Untuk Dokumen/Arsip Dinkes	Persentase Pembangunan Ruang Untuk Dokumen/Arsip Dinkes		100	266,774,531	100	283,549,062	100	283,403,787	100	494,686,375	100	528,000,763	100	528,000,763	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			36	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pengadaan Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		100	2,327,098,125	100	2,394,196,250	100	2,393,615,148	100	32,387,455,501	100	32,520,713,056	100	32,520,713,056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

				Pengadaan Alkes Untuk Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Persentase Pengadaan Alkes Untuk Puseksmas, Pustu dan Jaringannya	100	2,013,419,625	100	2,026,839,250	100	2,026,723,030	100	8,025,491,100	100	8,052,142,611	100	8,052,142,611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Studi Banding Program Alkes dan PKRT	Persentase Studi Banding Program Alkes dan PKRT	100	113,419,625	100	126,839,250	100	126,723,030	100	6,125,491,100	100	6,152,142,611	100	6,152,142,611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Konsultasi Program Alkes dan PKRT	Persentase Konsultasi Program Alkes dan PKRT	100	33,419,625	100	46,839,250	100	46,723,030	100	6,045,491,100	100	6,072,142,611	100	6,072,142,611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Monev Program Alkes dan PKRT	Persentase Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Monev Program Alkes dan PKRT	100	53,419,625	100	66,839,250	100	66,723,030	100	6,065,491,100	100	6,092,142,611	100	6,092,142,611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pertemuan Monev Pengelola Alkes di Puskesmas dan Pustu	Persentase Pertemuan Monev Pengelola Alkes di Puskesmas dan Pustu	100	113,419,625	100	126,839,250	100	126,723,030	100	6,125,491,100	100	6,152,142,611	100	6,152,142,611	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			37	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100	217,098,125	100	284,196,250	100	283,615,148	100	1,137,745,501	100	1,271,003,056	100	1,271,003,056	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Kalibrasi Alat Kesehatan yang Ada di Puskesmas	Persentase Kalibrasi Alat Kesehatan yang Ada di Puskesmas	100	166,774,531	100	183,549,062	100	183,403,787	100	396,936,375	100	430,250,763	100	430,250,763	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Obat & Vaksin	Persentase Pengadaan Obat & Vaksin	100	1,333,749,156	100	1,350,523,687	100	1,350,378,412	100	1,563,911,000	100	1,597,225,388	100	1,597,225,388	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase Pengadaan Bahan Habis Pakai	100	1,577,296,531	100	1,594,071,062	100	1,593,925,787	100	1,807,458,375	100	1,840,772,763	100	1,840,772,763	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	516,774,531	100	533,549,062	100	533,403,788	100	746,936,376	100	798,250,764	100	798,250,764	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			38	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Pengembangan Rumah Sakit	100	10,067,098,125	100	10,134,196,250	100	10,133,615,148	100	10,978,745,503	100	11,112,003,058	100	11,112,003,058	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		11	k	Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	73,510,124,379	100	73,979,811,258	100	69,912,094,763	100	75,828,007,238	100	76,760,810,125	100	76,760,810,125	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	191,682,929	100	221,038,358	100	33,193,922	100	402,938,451	100	461,238,631	100	461,238,631	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	195,490,429	100	224,845,858	100	29,386,422	100	399,130,951	100	457,431,131	100	457,431,131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	164,005,429	100	193,360,858	100	60,871,422	100	430,615,951	100	488,916,131	100	488,916,131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Audit Maternal Perinatal (AMP)	Persentase Audit Maternal Perinatal (AMP)	100	35,038,857	100	42,377,714	100	9,255,355	100	101,691,487	100	198,497,648	100	198,497,648	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

				Pertemuan Penanganan Dasar Komplikasi Maternal Perinatal	Persentase Pertemuan Penanganan Dasar Komplikasi Maternal Perinatal		100	32,588,857	100	39,927,714	100	6,805,355	100	99,238,487	100	196,044,648	100	196,044,648	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Persentase Pelatihan Peningkatan Kapasitas Petugas Pada Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)		100	53,838,857	100	61,177,714	100	28,055,355	100	120,491,487	100	217,297,648	100	217,297,648	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Evaluasi Pelaksanaan Penjarangan Anak Sekolah	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Penjarangan Anak Sekolah		100	42,538,857	100	49,877,714	100	16,755,355	100	109,191,487	100	205,997,648	100	205,997,648	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		100	102,090,429	100	131,445,858	100	122,786,422	100	492,530,951	100	550,831,131	100	550,831,131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Monev Program KIA/KB	Persentase Monev Program KIA/KB		100	102,090,429	100	131,445,858	100	122,786,422	100	492,530,951	100	550,831,131	100	550,831,131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			43	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		100	110,645,429	100	140,000,858	100	114,231,422	100	483,975,951	100	542,276,131	100	542,276,131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			44	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		100	107,005,429	100	136,360,858	100	117,871,422	100	487,615,951	100	545,916,131	100	545,916,131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Ketuk Pintu Program P2 TBC	Persentase Ketuk Pintu Program P2 TBC		100	52,327,714	100	69,355,428	100	60,110,710	100	244,982,974	100	274,133,064	100	274,133,064	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan SITB	Persentase Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan SITB		100	54,677,714	100	124,033,142	100	114,788,424	100	299,660,688	100	328,810,778	100	328,810,778	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			45	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV		100	99,355,429	100	128,710,858	100	125,521,422	100	495,265,951	100	553,566,131	100	553,566,131	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			46	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		100	834,355,429	100	863,710,858	100	609,478,578	100	979,223,107	100	1,037,523,287	100	1,037,523,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Alat, Bahan/Reagen Lab. Pemeriksaan Air dan Makanan	Persentase Pengadaan Alat, Bahan/Reagen Lab. Pemeriksaan Air dan Makanan		100	102,096,816	100	104,193,632	100	86,034,184	100	112,444,507	100	116,608,805	100	116,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan Dokumen Penyehatan Lingkungan Sehat (DPLH)	Persentase Penyusunan Dokumen Penyehatan Lingkungan Sehat (DPLH)		100	102,096,816	100	104,193,632	100	86,034,184	100	112,444,507	100	116,608,805	100	116,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM)		100	102,096,816	100	104,193,632	100	86,034,184	100	112,444,507	100	116,608,805	100	116,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

				Pembinaan dan Pengawasan DAMIU	Persentase Pembinaan dan Pengawasan DAMIU		100	52,096,816	100	54,193,932	100	36,034,184	100	62,444,507	100	66,608,805	100	66,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengelolaan Sampah Medis	Persentase Pengelolaan Sampah Medis		100	102,096,816	100	104,193,632	100	86,034,184	100	112,444,507	100	116,608,805	100	116,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Depot Air Minum		100	52,096,816	100	54,193,632	100	36,034,184	100	62,444,507	100	66,608,805	100	66,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Bimtek Pengelola Program Kesehatan Kerja di Puskesmas	Persentase Bimtek Pengelola Program Kesehatan Kerja di Puskesmas		100	12,096,816	100	14,193,632	100	3,965,816	100	30,376,139	100	34,540,437	100	34,540,437	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Verifikasi dan Deklarasi Desa ODF	Persentase Verifikasi dan Deklarasi Desa ODF		100	57,096,816	100	59,193,632	100	41,034,184	100	67,444,507	100	71,608,805	100	71,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Supervisi Program Penyehatan Lingkungan	Persentase Supervisi Program Penyehatan Lingkungan		100	62,096,816	100	64,193,632	100	46,034,184	100	72,444,507	100	76,608,805	100	76,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Konsultasi Teknis Ke Provinsi	Persentase Konsultasi Teknis Ke Provinsi		100	22,096,816	100	24,193,632	100	6,034,184	100	32,444,507	100	36,608,805	100	36,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Sistem Manajemen K3 di Sektor Formal	Persentase Sistem Manajemen K3 di Sektor Formal		100	42,096,816	100	44,193,632	100	26,034,184	100	52,444,507	100	56,608,805	100	56,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Monev Prog. UKK	Persentase Monev Prog. UKK		100	22,096,816	100	24,193,632	100	6,034,184	100	32,444,507	100	36,608,805	100	36,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Reagen Untuk Pemeriksaan Fisik Pekerja Formal dan Informal	Persentase Pengadaan Reagen Untuk Pemeriksaan Fisik Pekerja Formal dan Informal		100	52,096,816	100	54,193,932	100	36,034,184	100	62,444,507	100	66,608,805	100	66,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembinaan dan Pemeriksaan Kebugaran Calon Jemaah Haji dan ASN	Persentase Pembinaan dan Pemeriksaan Kebugaran Calon Jemaah Haji dan ASN		100	52,096,816	100	54,193,932	100	36,034,184	100	62,444,507	100	66,608,805	100	66,608,805	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			47	Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Persentase Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		100	344,355,429	100	373,710,858	100	119,478,578	100	489,223,107	100	547,523,287	100	547,523,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Program Yankestrad di Provinsi	Persentase Program Yankestrad di Provinsi		100	344,355,429	100	373,710,858	100	119,478,578	100	489,223,107	100	547,523,287	100	547,523,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			48	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase Pengelolaan Surveilans Kesehatan		100	1,229,355,429	100	1,258,710,858	100	1,004,478,578	100	1,374,223,107	100	1,432,523,287	100	1,432,523,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Monev Data Surveilans	Persentase Monev Data Surveilans		100	452,258,109	100	454,516,218	100	434,959,889	100	463,401,774	100	569,111,243	100	569,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Persentase Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB		100	52,258,109	100	54,516,218	100	34,959,889	100	63,401,774	100	169,111,243	100	169,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Sistem Kewaspadaan KLB	Sistem Kewaspadaan KLB		100	52,258,109	100	54,516,218	100	34,959,889	100	63,401,774	100	169,111,243	100	169,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

				Pengambilan Logistik dan Vaksin Program Imunisasi (Rutin dan Covid-19)	Persentase Pengambilan Logistik dan Vaksin Program Imunisasi (Rutin dan Covid-19)	100	102,258,109	100	104,516,218	100	84,959,889	100	113,401,775	100	219,111,244	100	219,111,244	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemantauan Kualitas Vaksin	Persentase Pemantauan Kualitas Vaksin	100	52,258,109	100	54,516,218	100	34,959,889	100	63,401,774	100	169,111,243	100	169,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemantauan dan Pendampingan Pelaksanaan Imunisasi di Posyandu dan Fasyankes	Persentase Pemantauan dan Pendampingan Pelaksanaan Imunisasi di Posyandu dan Fasyankes	100	102,258,109	100	104,516,218	100	84,959,889	100	113,401,775	100	219,111,244	100	219,111,244	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Effective Vaccine Management (EVM)	Persentase Effective Vaccine Management (EVM)	100	37,258,109	100	39,516,218	100	19,959,889	100	48,401,774	100	154,111,243	100	154,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Data Quality System (DQS)	Persentase Data Quality System (DQS)	100	37,258,109	100	34,516,218	100	14,959,889	100	43,401,774	100	149,111,243	100	149,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				FGD Strategi Komunikasi Membentuk Herd Immunity Terhadap PD3I dan Covid-19	Persentase FGD Strategi Komunikasi Membentuk Herd Immunity Terhadap PD3I dan Covid-19	100	102,258,109	100	104,516,218	100	84,959,889	100	113,401,774	100	219,111,244	100	219,111,244	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Supervisi Supportif Program Imunisasi	Persentase Supervisi Supportif Program Imunisasi	100	37,258,109	100	39,516,218	100	19,959,889	100	48,401,774	100	154,111,243	100	154,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelacakan KIPi Serius dan Non Serius	Persentase Pelacakan KIPi Serius dan Non Serius	100	52,258,109	100	54,516,218	100	34,959,889	100	63,401,774	100	169,111,243	100	169,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Petugas Imunisasi (Vaksinator) yang Tersertifikasi	Persentase Pelatihan Petugas Imunisasi (Vaksinator) yang Tersertifikasi	100	102,258,109	100	104,516,218	100	84,516,218	100	113,401,774	100	219,111,244	100	219,111,244	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pertemuan Lintas Sektor (Advokasi) Peningkatan Cakupan Imunisasi Tingkat Kabupaten	Persentase Pertemuan Lintas Sektor (Advokasi) Peningkatan Cakupan Imunisasi Tingkat Kabupaten	100	52,258,109	100	54,516,218	100	34,959,889	100	63,401,774	100	169,111,243	100	169,111,243	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			49	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	879,205,429	100	908,560,858	100	654,328,578	100	1,024,073,107	100	1,082,373,287	100	1,082,373,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			50	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	53,029,355,429	100	53,058,710,858	100	52,804,478,578	100	53,174,223,107	100	53,232,523,287	100	53,232,523,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				JKN	Persentase JKN	100	53,029,355,429	100	53,058,710,858	100	52,804,478,578	100	53,174,223,107	100	53,232,523,287	100	53,232,523,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			51	Re-Akreditasi Puskesmas	Persentase Re-Akreditasi Puskesmas	100	629,355,429	100	658,710,858	100	404,478,578	100	774,223,107	100	832,523,287	100	832,523,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			52	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	329,355,429	100	358,710,858	100	104,478,578	100	474,223,107	100	532,523,287	100	532,523,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			53	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Operasional Pelayanan Puskesmas	100	14,029,355,429	100	14,058,710,858	100	13,804,478,578	100	14,174,223,107	100	14,232,532,287	100	14,232,532,287	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			54	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		100	1,235,155,429	100	1,264,510,858	100	1,102,478,578	100	1,472,223,107	100	1,904,467,636	100	1,904,467,636	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Kaji Banding Kelayakan Implementasi Telemedicine dan Tentang PKM BLUD	Persentase Kaji Banding Kelayakan Implementasi Telemedicine dan Tentang PKM BLUD		100	88,892,571	100	93,785,142	100	66,779,762	100	128,403,850	100	200,444,604	100	200,444,604	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Konsultasi dan Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Konsultasi dan Koordinasi Program Pelayanan Kesehatan Primer		100	62,892,571	100	67,785,142	100	40,779,762	100	102,404,050	100	174,444,804	100	174,444,804	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program PIS PK	Persentase Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program PIS PK		100	104,892,571	100	109,785,142	100	82,779,762	100	144,403,850	100	216,444,604	100	216,444,604	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pembinaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer	Persentase Pembinaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Primer		100	48,292,571	100	53,185,142	100	26,179,762	100	87,803,850	100	159,844,604	100	159,844,604	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelayanan Kesehatan Keliling Terpadu di Daerah Terpencil	Persentase Pelayanan Kesehatan Keliling Terpadu di Daerah Terpencil		100	304,892,571	100	309,785,141	100	282,779,761	100	627,183,610	100	699,224,364	100	699,224,364	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Operasional Posko Public Servis Center (PSC)	Persentase Operasional Posko Public Servis Center (PSC)		100	625,292,571	100	630,185,142	100	603,179,762	100	664,803,850	100	736,844,604	100	736,844,604	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		12	1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100	690,686,879	100	1,160,373,758	100	1,156,306,042	100	7,072,218,517	100	8,005,021,404	100	8,005,021,404	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			55	Koordinasi dan Monitoring Pelayanan Rujukan Puskesmas Daerah dan Kepulauan	Persentase Koordinasi dan Monitoring Pelayanan Rujukan Puskesmas Daerah dan Kepulauan		100	217,421,719	100	334,843,438	100	333,826,509	100	2,062,804,627	100	2,296,005,348	100	2,296,005,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			56	Operasional Posko Public Servis Center (PSC) 119 Pusat Layanan Terpadu dan 16 Puskesmas	Persentase Operasional Posko Public Servis Center (PSC) 119 Pusat Layanan Terpadu dan 16 Puskesmas		100	189,421,719	100	306,843,438	100	305,826,509	100	2,034,804,627	100	2,268,005,348	100	2,268,005,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			57	Konsultasi Rujukan ke Provinsi	Persentase Konsultasi Rujukan ke Provinsi		100	141,421,719	100	258,843,438	100	257,826,509	100	1,986,804,627	100	2,220,005,348	100	2,220,005,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			58	Konsultasi Rujukan ke Kemenkes	Persentase Konsultasi Rujukan ke Kemenkes		100	142,421,719	100	259,843,438	100	258,826,509	100	1,987,804,627	100	2,221,005,348	100	2,221,005,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk		100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

		13	m	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			59	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Formal	Persentase Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Formal	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Kesehatan	Persentase Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Kesehatan	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan Dokumen SDM (Profil dan Renbut SDM)	Persentase Penyusunan Dokumen SDM (Profil dan Renbut SDM)	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan SDM	Persentase Penyusunan Dokumen Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan SDM	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Tim Penguji Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Persentase Pelatihan Tim Penguji Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Rekam Medik	Persentase Pelatihan Peningkatan Kompetensi Petugas Rekam Medik	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUM	Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	100	485,334,000	100	491,978,222	100	504,292,437	100	516,390,413	100	528,711,488	100	528,711,488	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		14	n	Pemberian Izin Apotek, Toko, Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pemberian Izin Apotek, Toko, Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	485,334,000	100	491,978,222	100	504,292,437	100	516,390,413	100	528,711,488	100	528,711,488	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			60	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga		100	485,334,000	100	491,978,222	100	504,292,437	100	516,390,413	100	528,711,488	100	528,711,488	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan UMOT Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Apotek, Toko Obat dan UMOT Terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan		100	47,325,174	100	48,274,348	100	48,274,348	100	48,274,348	100	48,274,348	100	48,274,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Monev Logistik Kefarmasian dan Laporan Dukungan Kefarmasian di Setiap Apotek Puskesmas	Persentase Monev Logistik Kefarmasian dan Laporan Dukungan Kefarmasian di Setiap Apotek Puskesmas		100	9,407,174	100	10,356,348	100	10,356,348	100	10,356,348	100	10,356,348	100	10,356,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengadaan Reagen Laboratorium	Persentase Pengadaan Reagen Laboratorium		100	44,721,174	100	45,670,348	100	45,670,348	100	45,670,348	100	45,670,348	100	45,670,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Bimtek Bagi Pengelola Sarana Pelayanan Kefarmasian	Persentase Bimtek Bagi Pengelola Sarana Pelayanan Kefarmasian		100	186,369,174	100	187,318,348	100	187,318,348	100	187,318,348	100	187,318,348	100	187,318,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh IRTP	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi PIRT dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi Oleh IRTP		100	111,654,174	100	112,603,348	100	112,603,348	100	112,603,348	100	112,603,348	100	112,603,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan		100	72,567,174	100	73,516,348	100	73,516,348	100	73,516,348	100	73,516,348	100	73,516,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Keamanan Pangan		100	118,539,174	100	119,488,348	100	119,488,348	100	119,488,348	100	119,488,348	100	119,488,348	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

			V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penurunan Masalah Kesehatan Masyarakat		100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
		15	o	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten		100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
			61	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Keamanan Pangan	Persentase Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Keamanan Pangan		100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar
					Total		100	163.155.201.303	100	165,287,427,009	100	154,424,571,307	100	173,489,066,772	100	177,628,515,905	100	177,628,515,905	Dinkes	Kab. Kepulauan Selayar

Tabel 6.2

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan RSUD K.H. Hayyung Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (Tahun 2020)	Rencana Tahun 2022		Rencana Tahun 2023		Rencana Tahun 2024		Rencana Tahun 2025		Rencana Tahun 2026		Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			RSUD K.H. Hayyung				83,730,189,092		84,876,455,381		81,400,913,059		89,088,064,963		91,213,706,194		91,213,706,194	
		I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan														
		1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulanan Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan			15,965,994,592		16,500,000,000		16,700,000,000		17,000,000,000		17,500,000,000		17,500,000,000	
		2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur yang Ditingkatkan Kinerja dan Profesionalismenya														
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi			110,000,000		150,000,000		165,000,000		200,000,000		250,000,000		250,000,000	
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Diselenggarakan														
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang Tersedia			172,700,000		200,000,000		250,000,000		250,000,000		350,000,000		350,000,000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan			38,500,000		45,000,000		50,000,000		75,000,000		100,000,000		100,000,000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			275,000,000		300,000,000		350,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000	
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah														
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Diadakan			1 Unit	500,000,000			500,000,000		500,000,000					
		5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dilaksanakan														
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Penunjang Kantor yang Diadakan			1,263,000,000		1,437,625,772		1,647,655,395		1,642,573,498		1,898,399,802		1,898,399,802	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengadaan Jasa Pihak Ketiga			12,297,029,500		12,500,000,000		13,250,000,000		13,500,000,000		14,000,000,000		14,000,000,000	
		6	Peningkatan Pelayanan BLUD	Peningkatan Pelayanan BLUD yang Dilaksanakan														
			Pelayanan dan Penunjang BLUD	Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			25,738,819,000		26,000,000,000		25,650,000,000		26,500,000,000		27,000,000,000		27,000,000,000	
		II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				27,369,146,000		27,743,829,609		22,838,257,664		29,120,491,465		29,815,306,392		29,815,306,392	

			1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah yang Dilaksanakan												
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Selesai Dibangun		1,600,000,000	800,000,000			800,000,000	800,000,000		800,000,000			
				Pengembangan Rumah Sakit	Pengembangan Rumah Sakit yang Dilaksanakan		24,699,146,000	25,293,829,609		21,538,257,664	26,835,491,465	27,215,306,392		27,215,306,392			
				Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilaksanakan		100,000,000	300,000,000		250,000,000	300,000,000	300,000,000		300,000,000			
			2	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia												
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		200,000,000	300,000,000		250,000,000	275,000,000	300,000,000		300,000,000			
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Operasional Pelayanan Rumah Sakit yang Dilaksanakan		200,000,000	300,000,000		250,000,000	275,000,000	350,000,000		350,000,000			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			200,000,000		150,000,000	165,000,000	200,000,000		200,000,000			
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		100,000,000	250,000,000		200,000,000	250,000,000	300,000,000		300,000,000			
			3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi												
				Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan yang Dilaksanakan		470,000,000	300,000,000		200,000,000	220,000,000	350,000,000		350,000,000			

Tabel 6.3
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)				
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)
Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi	0	55,00 (CC)		64,00 (CC)		68,00 (B)		73,00 (B)		76,00 (A)		76,00 (A)		
	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kesehatan			Nilai Sakip OPD	0	60,00(B)		65,00(B)		70,00(BB)		75,00(BB)		80,00(A)		80,00(A)		
				Indeks Kepuasan Masyarakat	0	70		72,50		75		80		85		85		
				Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	0	sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		sesuai		
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50.91	63.03	108,700,038,395	70.28	110,188,141,921	70.53	112,946,151,113	71.51	115,655,729,278	72.31	118,415,274,979	72.31	565,905,335,686	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79.35	83		85		88		91		95		95		
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100	100	1,060,160,000	100	88,783,000	100	350,000,000	100	385,000,000	100	423,500,000	100	2,307,443,000	DINKES
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	22,000,000	3	3,823,000	2	50,000,000	3	55,000,000	2	60,500,000	12	191,323,000	DINKES
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	21,500,000	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	192,000,000	DINKES
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	20,750,000	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	191,250,000	DINKES
		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	25,000,000	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	195,500,000	DINKES

		0.00.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	25,000,000	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	195,500,000	DINKES
		0.00.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	635,800,000	2	59,960,000	2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,500,000	10	861,260,000	DINKES
		0.00.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	310,110,000	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	480,610,000	DINKES
		1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	52,812,286,89 5	100	53,854,811,91 5	100	56,814,377,58 2	100	58,094,075,41 6	100	59,524,659,325	100	281,100,211,133	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	800	810	52,721,396,89 5	810	53,830,559,91 5	820	56,664,377,58 2	820	57,929,075,41 6	820	59,343,159,325	4080	280,488,569,133	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	175,500,000	DINKES
		0.00.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	5,300,000	1	4,252,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	175,052,000	DINKES
		0.00.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	25,340,000	1	5,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	195,840,000	DINKES
		0.00.01.2.0 2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	25,000,000	1	5,000,000	0	0	0	0	0	0	2	30,000,000	DINKES
		0.00.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	1	1	10,250,000	1	5,000,000	0	0	0	0	0	0	2	15,250,000	DINKES
		0.00.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis/Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	DINKES

		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100	100	422,775,000	100	15,000,000	100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	603,275,000	DINKES
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	422,775,000	1	15,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	603,275,000	DINKES
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100	100	420,875,000	100	160,000,000	100	265,000,000	100	310,000,000	100	371,000,000	100	1,526,875,000	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	80,000,000	0	0	1	30,000,000	1	33,000,000	1	36,300,000	4	179,300,000	DINKES
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	80,875,000	1	10,000,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	5	157,075,000	DINKES
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	10	260,000,000	5	150,000,000	10	215,000,000	10	255,000,000	15	310,500,000	50	1,190,500,000	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100	100	1,956,999,000	100	1,146,945,000	100	2,000,000,000	100	2,045,000,000	100	2,299,500,000	100	9,448,444,000	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	485,240,000	1	485,240,000	1	350,000,000	1	385,000,000	1	423,500,000	5	2,128,980,000	DINKES
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	172,700,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	250,000,000	1	350,000,000	5	1,222,700,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	68,500,000	1	52,160,000	1	130,000,000	1	183,000,000	1	236,300,000	5	669,960,000	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	25,000,000	1	4,020,000	1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	5	95,220,000	DINKES
		0.00.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	0	1	0	1	40,000,000	1	44,000,000	1	48,400,000	5	132,400,000	DINKES
		0.00.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	30,080,000	1	5,525,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	5	68,705,000	DINKES
		0.00.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	2	1,175,479,000	2	400,000,000	2	1,200,000,000	2	1,150,000,000	2	1,205,000,000	10	5,130,479,000	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG

		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	0	1	500,000,000	0	0	1	500,000,000	1	500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	500,000,000	0	0	1	500,000,000	1	500,000,000	0	0	3	1,500,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	24,798,103,273	100	28,047,159,772	100	26,716,773,531	100	27,106,653,862	100	28,010,115,654	100	134,678,806,092	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	2	1,963,392,998	2	2,088,181,772	2	2,425,493,463	2	2,492,892,680	2	2,822,536,728	10	11,792,497,641	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	22,834,710,275	2	25,958,978,000	2	24,291,280,068	2	24,613,761,182	2	25,187,578,926	10	122,886,308,451	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100	100	990,020,227	100	875,442,234	100	600,000,000	100	660,000,000	100	726,000,000	100	3,851,462,461	DINKES
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	220	220	504,500,227	220	873,982,234	223	500,000,000	225	550,000,000	225	605,000,000	1113	3,033,482,461	DINKES
		0.00.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	380,040,000	0	0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	4	545,540,000	DINKES
		0.00.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	26	50,000,000	26	55,000,000	26	60,500,000	78	165,500,000	DINKES
		0.00.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	105,480,000	1	1,460,000	0	0	0	0	0	0	2	106,940,000	DINKES
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD	1	1	25,738,819,000	1	26,000,000,000	1	25,650,000,000	1	26,500,000,000	1	27,000,000,000	1	130,888,819,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	25,738,819,000	1	26,000,000,000	1	25,650,000,000	1	26,500,000,000	1	27,000,000,000	5	130,888,819,000	RSUD K.H. HAYYUNG
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				Angka Usia Harapan Hidup	68,46	68,97		69,23		69,48		69,74		70		70		

	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			Persentase UKBM aktif	0	90		100		100		100		100		100		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	0	0	0	40	20,000,000	30	20,000,000	20	20,000,000	10	20,000,000	10	80,000,000	DINKES
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	100	0	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	60,000,000	DINKES
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	DINKES
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	100	20,000,000	100	0	100	0	100	0	100	20,000,000	DINKES
		1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	0	0	0	1	20,000,000	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	DINKES
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				Angka Usia Harapan Hidup	68,46	68,97	246,785,390,395	69,23	250,163,882,390	69,48	235,825,484,366	69,74	262,577,131,735	70	268,842,222,098	70	1,264,194,110,984	
	Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat			Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	324/100.000 KH	190/100.000 KH	246,785,390,395	180/100.000 KH	250,163,882,390	170/100.000 KH	235,825,484,366	160/100.000 KH	262,577,131,735	150/100.000 KH	268,842,222,098	150/100.000 KH	1,264,194,110,984	
				Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	3,7/1000 KH	4,4/1000 KH		4,3/1000 KH		4,2/1000 KH		4,1/1000 KH		4/1000 KH		4/1000 KH		
				Prevalensi Balita Gizi Kurang	0	4		3,5		3		2,5		2		2		
				Presentase Balita Gizi Buruk	0,09	0,8		0,7		0,6		0,5		0,4		0,4		
				Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (succes rate)	0	90		90		90		90		90		90		
				Persentase Desa/Kelurahan UCI	85,2	85		90		95		90		100		100		
				Persentase Pelayanan Hipertensi	93	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Rumah Tangga BerPHBS	0	67		69		71		73		75		75		

				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	81	100	137,600,018,000	100	139,383,762,247	100	122,275,040,816	100	146,305,012,044	100	149,798,235,631	99	695,362,068,738	
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	75	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	79	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	63	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	76	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	93	100		100		100		100		100		100		
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	75	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	93	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	92	100		100		100		100		100		99		
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100		100		100		100		100		100		
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100		100		100		100		100		101		
				Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	93	100		100		100		100		100		100		
				Nilai Akreditasi Rumah Sakit	100	100		100		100		100		100		100		
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG

		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Kewenangan Daerah yang Disediakan	100	100	57,292,273,729	100	52,279,018,510	100	41,168,069,416	100	56,837,343,504	100	51,187,300,237	100	258,764,005,396	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	2	7,126,898,000	2	15,152,379,170	2	6,262,211,845	2	14,469,852,039	2	6,996,793,845	10	50,008,134,899	DINKES
		1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	2	3	1,691,232,050	2	800,000,000	3	1,000,000,000	5	1,900,000,000	5	2,010,000,000	18	7,401,232,050	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	2	2	25,093,146,000	2	25,143,829,609	2	21,738,257,664	2	27,055,491,465	2	27,457,306,392	10	126,488,031,130	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2	2	12,193,428,381	2	1,445,551,568	2	3,867,599,907	2	4,257,000,000	2	4,682,700,000	10	26,446,279,856	DINKES
		1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1	1	9,215,000	0	0	3	500,000,000	3	550,000,000	3	605,000,000	10	1,664,215,000	DINKES
		1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	1	183,995,000	1	9,017,258,163	0	0	0	0	0	0	2	9,201,253,163	DINKES
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	1	6,532,406,626	0	0	1	7,000,000,000	1	7,700,000,000	1	8,470,000,000	4	29,702,406,626	DINKES
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Paket)	1	1	3,366,036,752	1	420,000,000	1	450,000,000	1	495,000,000	1	544,500,000	5	5,275,536,752	DINKES
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Paket)	1	1	995,915,920	0	0	0	0	0	0	0	0	1	995,915,920	DINKES
		1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan (Unit)	1	1	100,000,000	1	300,000,000	3	350,000,000	3	410,000,000	1	421,000,000	9	1,581,000,000	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	79,818,384,271	100	86,799,743,737	100	80,906,971,400	100	89,247,668,540	100	98,260,935,394	100	435,033,703,342	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG

		1.02.02.2.0 2.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	0	0	30	5,000,000	30	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	125	170,500,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	30	161,319,000	0	0	30	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	125	326,819,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30	30	24,050,000	0	0	30	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	125	189,550,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20	0	0	0	0	20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	85	165,500,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20	0	0	0	0	20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	85	165,500,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20	0	0	0	0	20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	85	165,500,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20	0	0	0	0	20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	85	165,500,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	20	20	24,458,000	0	0	20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	105	189,958,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20	20	14,892,000	0	0	20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	105	180,392,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20	20	15,108,000	0	0	20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	105	180,608,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1	1	66,871,000	0	0	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	4	232,371,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1	2	4,788,697,035	2	3,169,710,500	2	3,250,000,000	2	3,575,000,000	2	3,930,000,000	10	18,713,407,535	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.0 2.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1	1	85,192,000	1	105,000,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	355,692,000	DINKES

		1.02.02.2.0 2.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1	1	2,676,698,244	1	635,850,000	1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	3,478,048,244	DINKES
		1.02.02.2.0 2.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2	2	485,888,592	2	282,251,837	2	650,000,000	2	715,000,000	2	805,000,000	10	2,938,140,429	DINKES & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.0 2.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1	1	53,266,856,400	1	61,406,805,400	1	58,349,908,400	1	64,184,899,240	1	70,603,389,164	5	307,811,858,604	DINKES
		1.02.02.2.0 2.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	1	31,746,000	1	5,000,000	1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	5	698,746,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dokumen)	1	1	200,000,000	1	300,000,000	1	250,000,000	1	275,000,000	1	350,000,000	5	1,375,000,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	1	1	17,057,063,000	1	18,660,462,000	1	17,057,063,000	1	18,762,769,300	1	20,639,046,230	5	92,176,403,530	DINKES
		1.02.02.2.0 2.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1	1	819,545,000	1	1,979,664,000	1	300,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	5	4,254,209,000	DINKES
		1.02.02.2.0 2.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	100,000,000	1	250,000,000	1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	5	1,100,000,000	DINKES
		1.02.02.2.0 3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	100	470,000,000	100	300,000,000	100	200,000,000	100	220,000,000	100	350,000,000	100	1,540,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.0 3.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	470,000,000	1	300,000,000	1	200,000,000	1	220,000,000	1	350,000,000	5	1,540,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.0 4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	19,360,000	100	5,000,000	100	0	100	0	100	0	100	24,360,000	DINKES
		1.02.02.2.0 4.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1	1	19,360,000	1	5,000,000	0	0	0	0	0	0	2	24,360,000	DINKES

		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	0.00028	0.00031	0	0.00036	80,000,000	0.00036	80,000,000	0.00045	80,000,000	0.00045	80,000,000	0.00045	320,000,000	DINKES
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	100	0	100	0	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	240,000,000	DINKES
		1.02.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	3	240,000,000	DINKES
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	100	0	100	80,000,000	100	0	100	0	100	0	100	80,000,000	DINKES
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	10	0	0	10	80,000,000	0	0	0	0	0	0	10	80,000,000	DINKES
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	100	100	485,334,000	100	491,978,222	100	504,292,437	100	516,390,413	99	528,711,488	100	2,526,706,560	DINKES
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	100	485,334,000	100	491,978,222	100	504,292,437	100	516,390,413	100	528,711,488	100	2,526,706,560	DINKES
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1	1	485,334,000	1	491,978,222	1	504,292,437	1	516,390,413	1	528,711,488	5	2,526,706,560	DINKES
Total							246,785,390,395	250,163,882,390	235,825,484,366	262,577,131,735	268,842,222,098	1,264,194,110,984						

Tabel 6.4
Perubahan Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026 (Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)					
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
Mewujudkan Reformasi dan Birokrasi Daerah				Indeks Reformasi Birokrasi	0					68,00 (B)		73,00 (B)		76,00 (A)		76,00 (A)			
	Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kesehatan			Nilai Sakip OPD	0					70,00(BB)		75,00(BB)		80,00(A)		80,00(A)			
				Indeks Kepuasan Masyarakat	0					75		80		85		85			
				Laporan Keuangan OPD Sesuai SAP	0					sesuai		sesuai		sesuai		sesuai			
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Capaian Kinerja	50,91					70,53	112,946,151,113	71,51	115,655,729,278	72,31	118,415,274,979	72,31	565,905,335,686		DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35					88		91		95		95			
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu	100					100	350,000,000	100	385,000,000	100	423,500,000	100	2,307,443,000		DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2					2	50,000,000	3	55,000,000	2	60,500,000	12	191,323,000		DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	192,000,000		DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	191,250,000		DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	195,500,000		DINAS KESEHATAN

		0.00.01. 2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	195,500,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01. 2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2					2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,500,000	10	861,260,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01. 2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	480,610,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100					100	56,814,377,58 2	100	58,094,075,41 6	100	59,524,659,325	100	281,100,211,133	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01. 2.02.000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	800					820	56,664,377,58 2	820	57,929,075,41 6	820	59,343,159,325	4080	280,488,569,133	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01. 2.02.000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	175,500,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01. 2.02.000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	175,052,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01. 2.02.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	195,840,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01. 2.02.000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1					0	0	0	0	0	0	2	30,000,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01. 2.02.000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	1					0	0	0	0	0	0	2	15,250,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01. 2.02.000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis/Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1					0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	DINAS KESEHATAN

		1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan pengelolaan barang milik daerah yang diselesaikan tepat waktu	100					100	50,000,000	100	55,000,000	100	60,500,000	100	603,275,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	603,275,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki predikat kinerja sangat baik	100					100	265,000,000	100	310,000,000	100	371,000,000	100	1,526,875,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1					1	30,000,000	1	33,000,000	1	36,300,000	4	179,300,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1					1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	5	157,075,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5					10	215,000,000	10	255,000,000	15	310,500,000	50	1,190,500,000	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100					100	2,000,000,000	100	2,045,000,000	100	2,299,500,000	100	9,448,444,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1					1	350,000,000	1	385,000,000	1	423,500,000	5	2,128,980,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1					1	250,000,000	1	250,000,000	1	350,000,000	5	1,222,700,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1					1	130,000,000	1	183,000,000	1	236,300,000	5	669,960,000	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1					1	20,000,000	1	22,000,000	1	24,200,000	5	95,220,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1					1	40,000,000	1	44,000,000	1	48,400,000	5	132,400,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1					1	10,000,000	1	11,000,000	1	12,100,000	5	68,705,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2					2	1,200,000,000	2	1,150,000,000	2	1,205,000,000	10	5,130,479,000	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG

		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah	0				1	500,000,000	1	500,000,000	0	0	0	1,500,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0				1	500,000,000	1	500,000,000	0	0	3	1,500,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100				100	26,716,773,531	100	27,106,653,862	100	28,010,115,654	100	134,678,806,092	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2				2	2,425,493,463	2	2,492,892,680	2	2,822,536,728	10	11,792,497,641	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2				2	24,291,280,068	2	24,613,761,182	2	25,187,578,926	10	122,886,308,451	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100				100	600,000,000	100	660,000,000	100	726,000,000	100	3,851,462,461	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	220				223	500,000,000	225	550,000,000	225	605,000,000	1113	3,033,482,461	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1				1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	4	545,540,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0				26	50,000,000	26	55,000,000	26	60,500,000	78	165,500,000	DINAS KESEHATAN
		0.00.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1				0	0	0	0	0	0	2	106,940,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase BLUD	1				1	25,650,000,000	1	26,500,000,000	1	27,000,000,000	1	130,888,819,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		0.00.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1				1	25,650,000,000	1	26,500,000,000	1	27,000,000,000	5	130,888,819,000	RSUD K.H. HAYYUNG
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				Angka Usia Harapan Hidup	68,46				69,48		69,74		70		70		

	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			Persentase UKBM aktif	0				100		100		100		100		
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase penurunan masalah kesehatan masyarakat	100				30	20,000,000	20	20,000,000	10	20,000,000	10	80,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100				100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	60,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1				1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	3	60,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	20				0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100				100	0	100	0	100	0	100	20,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1				0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	20				0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				Angka Usia Harapan Hidup	68,46				69,48	235,825,484,366	69,74	262,577,131,735	70	268,842,222,098	70	1,264,194,110,984	
Meningkatnya Upaya Penanganan Masalah Kesehatan Masyarakat				Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH	324/100.000 KH				170/100.000 KH	235,825,484,366	160/100.000 KH	262,577,131,735	150/100.000 KH	268,842,222,098	150/100.000 KH	1,264,194,110,984	
				Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 KH	3,7/1000 KH				4,2/1000 KH		4,1/1000 KH		4/1000 KH		4/1000 KH		
				Prevalensi Balita Gizi Kurang	0				3		2,5		2		2		

				Presentase Balita Gizi Buruk	0,09				0,6		0,5		0,4		0,4			
				Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB semua tipe (succes rate)	0				90		90		90		90			
				Persentase Desa/Kelurahan UCI	85,2				95		90		100		100			
				Persentase Pelayanan Hipertensi	93				100		100		100		100			
				Persentase Rumah Tangga BerPHBS	0				71		73		75		75			
				Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	81				100	122,275,040,8 16	100	146,305,012,0 44	100	149,798,235,631	99	695,362,068,738		
				Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	75				100		100		100		100			
				Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	79				100		100		100		100			
				Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	63				100		100		100		100			
				Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	76				100		100		100		100			
				Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	93				100		100		100		100			
				Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	75				100		100		100		100			
				Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	93				100		100		100		100			
				Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	92				100		100		100		99			
				Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100				100		100		100		100			
				Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100				100		100		100		101			
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT														DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG	

				Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	93					100		100		100					
				Nilai Akreditasi Rumah Sakit	100					100		100		100					
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKM Kewenangan Daerah yang Disediakan	100					100	41,168,069,416	100	56,837,343,504	100	51,187,300,237	100	258,764,005,396	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG	
		1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	5					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1					2	6,262,211,845	2	14,469,852,039	2	6,996,793,845	10	50,008,134,899	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	2					3	1,000,000,000	5	1,900,000,000	5	2,010,000,000	18	7,401,232,050	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG	
		1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2					2	3,867,599,907	2	4,257,000,000	2	4,682,700,000	10	26,446,279,856	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	1					5	850,000,000	5	850,000,000	5	1,026,000,000	10	1,664,215,000	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG	

		1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG	
		1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1					1	7,000,000,000	1	7,700,000,000	1	8,470,000,000	4	29,702,406,626	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	2					2	21,738,257,664	2	27,055,491,465	2	27,457,306,392	10	126,488,031,130	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	1					1	450,000,000	1	495,000,000	1	544,500,000	5	5,275,536,752	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis)	Jumlah Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	1					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100					100	80,906,971,400	100	89,247,668,540	100	98,260,935,394	100	435,033,703,342	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG

		1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30					30	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	125	170,500,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30					30	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	125	326,819,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	30					30	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	125	189,550,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20					20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	85	165,500,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20					20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	85	165,500,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20					20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	85	165,500,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	20					20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	85	165,500,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	20					20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	105	189,958,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20					20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	105	180,392,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	20					20	50,000,000	30	55,000,000	35	60,500,000	105	180,608,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

		1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	4	232,371,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	1					2	3,250,000,000	2	3,575,000,000	2	3,930,000,000	10	18,713,407,535	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	355,692,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	1					1	50,000,000	1	55,000,000	1	60,500,000	5	3,478,048,244	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	10					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	2					2	650,000,000	2	715,000,000	2	805,000,000	10	2,938,140,429	DINAS KESEHATAN & RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	1					1	58,349,908,400	1	64,184,899,240	1	70,603,389,164	5	307,811,858,604	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	10					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional /Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan Nasional yang Didistribusikan	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1					1	200,000,000	1	220,000,000	1	242,000,000	5	698,746,000	DINAS KESEHATAN

		1.02.02.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan Telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	1					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan RumahSakit (Dokumen)	1					1	250,000,000	1	275,000,000	1	350,000,000	5	1,375,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional PelayananPuskesmas (Dokumen)	1					1	17,057,063,000	1	18,762,769,300	1	20,639,046,230	5	92,176,403,530	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional PelayananFasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	1					1	300,000,000	1	550,000,000	1	605,000,000	5	4,254,209,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan diKabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi diKabupaten/Kota (Unit)	1					1	200,000,000	1	250,000,000	1	300,000,000	5	1,100,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.02.0036	Investigasi Awal kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terntegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	10					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0043	Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN

		1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100					100	200,000,000	100	220,000,000	100	350,000,000	100	1,540,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1					1	200,000,000	1	220,000,000	1	350,000,000	5	1,540,000,000	RSUD K.H. HAYYUNG
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100					100	0	100	0	100	0	100	24,360,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	1					0	0	0	0	0	0	2	24,360,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasyankes Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasyankes Tingkat daerah Kabupaten/Kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1					0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk	0.00028					0.00036	80,000,000	0.00045	80,000,000	0.00045	80,000,000	0.00045	320,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rasio Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100					100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	240,000,000	DINAS KESEHATAN

		1.02.03. 2.02.000 1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan SDM Kesehatan	1					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.03. 2.02.000 2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi satndar di fasyankes	10					0	0	0	0	0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.03. 2.02.000 3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1					1	80,000,000	1	80,000,000	1	80,000,000	3	240,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.03. 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100					100	0	100	0	100	0	100	80,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.03. 2.03.000 1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	10					0	0	0	0	0	0	10	80,000,000	DINAS KESEHATAN
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Peersentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	100					100	504,292,437	100	516,390,413	99	528,711,488	100	2,526,706,560	DINAS KESEHATAN
		1.02.04. 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100					100	504,292,437	100	516,390,413	100	528,711,488	100	2,526,706,560	DINAS KESEHATAN
		1.02.04. 2.03.000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	1					1	504,292,437	1	516,390,413	1	528,711,488	5	2,526,706,560	DINAS KESEHATAN
TOTAL											235,825,484,3 66		262,577,131,7 35		268,842,222,098			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG KESEHATAN

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Angka Usia Harapan Hidup	68,46	68,97	69,23	69,48	69,74	70	70
2.	Persentase Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	81	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	75	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	79	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	63	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	76	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	93	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	75	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	93	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	92	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100

12.	Persentase Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	93	100	100	100	100	100	100
14.	Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk	28/1.000 Penduduk	31/1.000 Penduduk	36/1.000 Penduduk	36/1.000 Penduduk	45/1.000 Penduduk	45/1.000 Penduduk	45/1.000 Penduduk
15.	Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat	100	100	100	100	100	100	100
16.	Persentase Penurunan Masalah Kesehatan Masyarakat	N/A	40	30	20	10	10	10
17.	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Utama						

Tabel 7.2
Penetapan Target Indikator SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

No.	Indikator	Target Nasional	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6.	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10.	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12.	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 7.3
Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Bidang Kesehatan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022-2026

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2020	Target Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan								
1.	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan Melalui SJSN Bidang Kesehatan	%	96,7	97,1	97,6	98,1	98,5	99
2.	Persentase Anak Umur 12-23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap	%	69,7	74,15	78,89	83,93	89,29	95,00
Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan								
1.	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita	%	6,30	5,01	3,98	3,16	2,52	2,00
2.	Prevalensi Stunting Pada Anak di Bawah 5 Tahun/Balita	%	19,17	18,9	18,77	18,63	18,5	18,37
3.	Prevalensi Stunting Pada Anak di Bawah 2 Tahun/Baduta	%	21,90	20,30	18,82	17,45	16,18	15,00
4.	Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil	%	68,60	63,05	57,95	53,27	48,96	45,00
5.	Persentase Bayi Usia Kurang Dari 6 Bulan yang Mendapatkan ASI Eksklusif	%	58,10	61,14	64,35	67,72	71,27	75,00
Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera								
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	kematian per 100.000	324 per 100.000 KH	per 100.000 KH	294 per 100.000 KH	267 per 100.000 KH	242 per 100.000 KH	220 per 100.000 KH

		KH						
2.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	kematian per 1.000 KH	3,7 per 1.000 KH	2,8 per 1.000 KH	2,2 per 1.000 KH	1,7 per 1.000 KH	1,3 per 1.000 KH	1 per 1.000 KH
3.	Kejadian Malaria per 1.000 Orang	per 1.000 penduduk	0,10 per 1.000 penduduk	0,1 per 1.000 penduduk	< 1 per 1.000 penduduk			
4.	Prevalensi HIV Pada Populasi Dewasa	%	0,00071	0,00066	0,00062	0,00058	0,00054	0,0005
5.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk	per 100.000 penduduk	159	150	142	134	127	120
6.	Prevalensi Tekanan Darah Tinggi	%	16,35	10,74	7,06	4,63	3,04	2,00
7.	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	%	0,3	0,2	0,1	0,1	0	0
8.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	99,7	99,8	99,9	99,9	100	100
Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak								
1.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak	%	85,96	81,35	82,56	83,45	84,56	85,3
2.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	%	74,94	6,51	6,85	7,22	7,6	8
3.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Desa	88	44	59	79	99	119

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 merupakan rencana yang masih bersifat strategis dan indikatif, sehingga masih diperlukan penjabaran secara teknis operasional setiap tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan dalam kurun waktu lima tahun. Penjabaran ini berupa Rencana Kerja Tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif program kegiatan yang telah ditentukan di RPJMD dan Renstra.

Pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Kesehatan. Sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar dan tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan ini juga akan lebih ditentukan melalui keterlibatan Stakeholder pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

Benteng, 01 Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

dr. H. Husaini, M.Kes

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196512141998031005